

**Dinamika Politik Islam Di Indonesia
Era Reformasi
(Studi Fenomenologis Partai Keadilan Sejahtera
1999-2009)**



Oleh:

Drs. Mochamad Parmudi, M.Si.

NIP: 196904252000031001

**DIBIYAI DENGAN ANGGARAN DIP
FAKULTAS USHULUDDIN
IAIN WALISONGO SEMARANG
2013**

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka pengembangan keilmuan di Jurusan Perbandingan Agama Fakultas Ushuluddin IAIN Walisongo, maka sejak tahun akademik 2010/2011 telah dibuka mata kuliah pilihan **“Islam dan Politik di Indonesia”** yang bertujuan untuk memberi bekal tambahan, dan penguatan atas kompetensi khusus yang dimiliki mahasiswa.

Pada semester genap tahun akademik 2012/2013 saya diberi tugas untuk mengampu mata kuliah “Islam dan Politik di Indonesia” yang antara lain membahas topik realitas sosial politik yang ada di Indonesia yakni Partai Politik Islam di Indonesia Era Reformasi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka latar belakang masalah penelitian ini adalah, bahwa Partai Keadilan Sejahtera (selanjutnya ditulis PKS) sebagai Partai Islam merupakan fenomena unik dalam arena perpolitikan Indonesia. PKS didirikan pada tanggal 20 Juli 1998 oleh para aktivis kampus (Jema'ah Tarbiyah) dan secara resmi dideklarasikan pada 9 Agustus 1998. Dalam menghadapi realitas politik Indonesia PKS cenderung adaptif dan lentur, kendatipun begitu tetap mengusung gagasan Islam sebagai

solusi komprehensif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.¹

PKS adalah partai yang tidak biasa (*unusual party*), ia lahir dari rahim gerakan sosial bernama Jama'ah Tarbiyah yang kemudian bermetamorfosis menjadi partai politik Islam. Basis sosial partai tersebut adalah kelompok Muslim terdidik, muda, dan golongan kelas menengah kota. PKS tampil sebagai “partai kader” yang militansinya cukup tinggi dengan menerapkan standar ketat, disiplin dalam proses rekrutmen dan pelatihan anggota-anggotanya, juga aktif dalam bakti sosial membantu korban bencana alam di Indonesia.²

Pada Pemilu 1999 dengan nama Partai Keadilan atau PK, secara nasional memperoleh 1.436.565 suara atau 1,4 % (7 kursi) dan mengalami peningkatan yang sangat signifikan pada Pemilu 2004 dengan perolehan suara 8.325.020 atau 7,34% suara. Namun kemudian jumlah suara PKS menurun dalam Pemilu 2009 yang lalu, yaitu 8.206.955, walaupun persentasenya sedikit meningkat menjadi 7,38% karena akibat penurunan jumlah suara sah.

¹ Suaidi Asy'ari, ***Nalar Politik NU dan Muhammadiyah***, (Yogyakarta :LKIS,2010), hlm. 162-163 yang mengutip Ali Said Damanik, ***Fenomena Partai Keadilan : Transformasi 20 Tahun Gerakan Tarbiyah di Indonesia***, (Jakarta: Teraju, 2002)

² Burhanuddin Muhtadi, ***Dilema PKS : Suara dan Syari'ah***, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2012), hlm. 5

Sebagian kalangan, baik internal PKS maupun eksternal melihat stagnasi perolehan suara PKS sebagai sinyal menguatnya dinamika internal partai itu, terutama pasca Pemilu 2004.³

Penelaahan proses pembentukan PKS (hingga bisa diterima / *welcome* di Indonesia) dan pemingkiaan *transnasional* Islamisnya diharapkan menjadi pintu masuk untuk meneliti faktor-faktor di balik kemunculan PKS dari gerakan sosial yang kemudian bertransformasi menjadi partai politik. Kemudian proses tarik-menarik kepentingan di internal kader PKS juga akan diteliti secara mendalam untuk melihat disorientasi yang terjadi sesudah peralihan menjadi partai politik.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka rumusan pokok masalah atau pertanyaan penelitian ini adalah, “Mengapa PKS lahir di Indonesia?”

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini merupakan studi fenomenologis yang berfokus pada pengembangan deskripsi dan eksplanasi yang mendalam mengenai dinamika internal PKS dalam arena politik Indonesia dengan tujuan untuk:

³ Arief Munandar, *Antara Jemaah Dan Partai Poltiik: Dinamika Habitus Kader PKS dalam Arena Politik Indonesia Pasca Pemilu 2004*, (Jakarta: Universitas Indonesia:2011), hlm.,1

1. Menjelaskan proses-proses dan faktor-faktor organisasional yang menyebabkan dan memfasilitasi kemunculan PKS.

2. Menjelaskan implikasi dinamika internal PKS terhadap kapasitas tindakan (strategi electoral) sebagai kontestan di arena politik praktis.

Adapun kegunaan penelitian ini yaitu:

1. Bagi ilmu pengetahuan, penelitian ini memperkaya bangunan pengetahuan (*body of knowledge*) sosiologi politik, khususnya mengenai organisasi (*institusi*) politik dan pola hubungan kekuasaan (*power relationship*).
2. Bagi politisi (elite maupun kader partai politik), senator, penelitian ini akan bermanfaat secara praktis yaitu berupa strategi yang dapat dilakukan untuk memperkuat upayanya menjadi pemimpin politik (*elective-political leader*), termasuk di dalamnya ada arena pemilihan pemimpin politik secara langsung, dan pejabat pemerintah (birokrat) juga masyarakat pemerhati politik, penelitian ini menjadi penting untuk dipakai rujukan dalam memahami gerakan partai politik Islam (PKS).

D. Kajian Pustaka

Ada beberapa kajian terdahulu mengenai dinamika politik Islam di Indonesia era reformasi (studi tentang

fenomena PKS), antara lain: Pemetaan yang relatif lengkap tentang kiprah Islam politik di Indonesia dikemukakan oleh Anies Baswedan (2004).⁴ Dari tujuh partai yang meraih suara signifikan dalam Pemilu 1999, Baswedan menempatkan PBB, PPP, PKS, PKB, PAN dan Partai Golkar ke dalam kategori *Islam-friendly parties*, sedangkan PDIP sebagai *secular-exclusive party* yang menjaga jarak terhadap agenda-agenda Islam.

Karya Ali Said Damanik, *Fenomena Partai Keadilan: Transformasi 20 tahun Gerakan Tarbiyah di Indonesia*, Penerbit Teraju, Jakarta, 2002, telah memberikan gambaran yang *jelas* bahwa PKS adalah partai politik yang memiliki akar dalam gerakan dakwah kampus. Damanik berpendapat bahwa transformasi PKS dari gerakan mahasiswa menjadi gerakan politik dimungkinkan oleh dua pengaruh global: revolusi Iran tahun 1979 dan Ikhwanul Muslimin di Mesir. Dan, dia menyimpulkan bahwa PKS lebih dipengaruhi oleh aktifis dan gagasan-gagasan Ikhwanul Muslimin melalui tulisan-tulisan para ideolog Ikhwan seperti Hassan al-Banna dan Sayyid Quthub *ketimbang* Revolusi Islam di Iran.

⁴ Arief Munandar, *Antara Jemaah Dan Partai Poltiik: Dinamika Habitus Kader PKS dalam Arena Politik Indonesia Pasca Pemilu 2004*, (Jakarta: Universitas Indonesia:2011)5, hlm., 669-690.

Karya Bubalo dan Fealy⁵ tentang pengaruh buku-buku Timur Tengah terhadap gerakan-gerakan Islamis di Indonesia, menegaskan sekali lagi bahwa PKS terinspirasi oleh Ikhwanul Muslimin. Berhubung agenda aksi PKS diletakkan dalam bingkai partai politik yang mencari dukungan *massa* dari *public*, Bubalo dan Fealy menyimpulkan bahwa dampak sosial-politik PKS jauh lebih luas dan massif *ketimbang* gerakan salafisme radikal.

Sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh Furkon menyimpulkan bahwa PKS tidak dapat sepenuhnya dilihat sebagai cabang (*offshoot*) Ikhwanul Muslimin. Menurut Furkon, PKS tidak mempunyai pemimpin atau tokoh kharismatik, berbeda dengan Ikhwanul Muslimin yang sangat bergantung pada ketokohan al-Banna. Bagi Furkon, justru pandangan politik PKS sejalan dengan modernisme Islam.⁶

Kajian yang relatif komprehensif tentang PKS dilakukan oleh Yon Machmudi, (disertasi Ph.D.-nya di Australian National University) salah seorang pendiri partai

⁵ Burhanuddin Muhtadi, ***Dilema PKS : Suara dan Syari'ah***, hlm. 10-13, lihat Anthony Bubalo & Greg Fealy, ***Joining the Caravan? Middle East, Islamism, and Indonesia***, Lowy Institute for International Policy, Australia, 2005

⁶ *Ibid.*, lihat Aay Muhammad Furkon, ***Partai Keadailan Sejahtera: Ideologi dan Praksis Politik Kaum Muda Muslim Indonesia Kontemporer***, Teraju, Jakarta, 2004

tersebut⁷. Machmudi menunjukkan bahwa PKS memiliki sejarah yang panjang: *halaqah* yang berlanjut dengan organisasi-organisasi kemahasiswaan, pendirian jejaring gerakan ekstra kampus melalui Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus (FSLDK) yang kemudian membidani Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) menjelang Reformasi 1998, dan akhirnya mendirikan Partai keadilan (PK) pada tanggal 28 Juli 1998 yang berubah nama menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada tanggal 20 April 2003. Intinya, Machmudi memfokuskan kajian pada asal-usul, ideology, dan pengaruh PKS terhadap Islam di Indonesia. Ia menyatakan bahwa: “PKS tidak berupaya mengusung penerapan syariah melainkan mencoba merevisi citra partai dengan mencurahkan energy pada isu-isu keadilan dan kesejahteraan.

Arief Munandar dalam disertasinya, *Antara Jemaah Dan Partai Poltiik: Dinamika Habitus Kader PKS dalam Arena Politik Indonesia Pasca Pemilu 2004*, menyimpulkan bahwa kemampuan PKS dalam berkiprah di arena politik Indonesia ditentukan oleh kapasitas tindakan kolektifnya. Dengan kata lain, lompatan perolehan suara di Pemilu 2004 dibandingkan Pemilu 1999 mencerminkan

⁷ Yon Machmudi, ***Partai Keadilan Sejahtera: Wajah Baru Islam Politik Indonesia***, Syaamil Cipta Media, Bandung, 2006

lompatan pada kualitas tindakan kolektif PKS. Sebaliknya, *stagnasi* prestasi PKS di Pemilu 2009 juga menunjukkan bahwa dari 2004 ke 2009 tidak terdapat peningkatan yang berarti pada kapatisitas tindakan kolektif PKS. Hal terjadi ini karena ada pelemahan kohesi sosial atau *group inclusiveness*.

Buku *Dilema PKS: Suara dan Syariah*, yang diolah dari tesis Burhanduddin Muhtadi di Australian National University, memotret fenomena PKS dari sudut pandang akademis, mulai dari asal-usulnya sebagai Jama'ah Tarbiyah pada masa Orde Baru, pengaruh ideologis dari Ikhwanul Muslimin Mesir, pendirian Partai Keadilan pada awal Reformasi, sampai dinamika internal antara berbagai aspirasi dalam PKS. Juga dibahas mengenai strategi PKS memperjuangkan agenda politik Islamis-nya di panggung politik Indonesia.

Penelitian ini mencoba meramu kepustakaan yang ada, mengkaji lebih lanjut, dan menautkannya dengan penelitian yang lebih komprehensif sesuai dengan judul penelitian; *Dinamika Politik Islam Di Indonesia (Studi Fenomenologis PKS 1999-2009)*.

E. Kerangka Teori

1. Pendekatan Integrasi Gerakan Sosial

Dalam tradisi penelitian gerakan sosial, hampir semua perspektif kajian ini adalah menjelaskan, pertama-

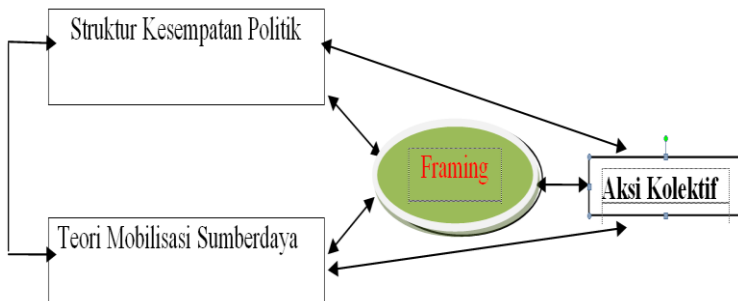
tama dan yang paling utama, teori-teori munculnya gerakan sosial. Kajian gerakan sosial memfokuskan diri pada upaya sistematis untuk memahami: 1). Asal-usul gerakan sosial dan faktor-faktor serta proses-proses yang membentuk atau menjelaskan kemunculan gerakan sosial tersebut. 2). Diseminasi dan pembentukan atau pengorganisasian gerakan.⁸ Di kalangan sarjana gerakan sosial ada kesepakatan yang muncul terkait pentingnya tiga faktor yaitu: *pertama, political opportunities* (kesempatan politik), *kedua, mobilizing structures* (struktur mobilisasi) atau *resource mobilization* (mobilisasi sumber daya), dan *ketiga, framing processes* (proses pembedaan).

Sebelum terjadi integrasi perspektif gerakan sosial, setiap *trend* intelektual dari ketiga faktor tersebut di atas lebih menekankan pada satu aspek gerakan saja. Misalnya, para pendukung mobilisasi sumber daya (*resource mobilization*) lebih menekankan pentingnya dinamika organisasi *ketimbang* aksi kolektif, sementara para pendukung pembedaan aksi kolektif (*collective action frames*) mengkritik teori mobilisasi sumber daya (*resources mobilization*) dan kesempatan politik (*political opportunity*) karena terlalu banyak memberi pada masalah-masalah

⁸McAdam, McCharty & Zald, "Introduction", ***Comparative Perspective***, 1996, hlm.,7 sebagaimana dikutip oleh Burhanuddin Muhtadi, ***Dilema PKS : Suara dan Syari'ah***, hlm., 20

politik dan organisasi, tetapi mengabaikan pentingnya konstruksi sosial sebuah gagasan.

Untuk itu, penelitian ini tidak akan menjelaskan setiap faktor secara terpisah dan juga tidak akan member porsi pembahasan lebih banyak terhadap satu aspek tertentu saja dalam gerakan sosial. Studi ini justru akan menggabungkan ketiga *trend* atau faktor yang muncul dalam penelitian gerakan sosial tersebut di atas. Masing-masing pendekatan akan diperlakukan sama dalam bentuk yang terintegrasi satu sama lain *ketimbang* secara terpisah (lihat skema).⁹



⁹ Catatan yang lebih detail tentang diskusi sintesis tiga perspektif tersebut lihat Doug McAdam, Sidney Tarrow & Charles Tilly, "Toward an Integrated Perspective on Social Movements and Revolution", dalam Mark Irving Lichbach & Aland S. Zukerman (ed.), **Comparative Politics**, Cambridge University Press, New York, 1997,

Menurut Lichbach, ketiga perspektif utama tersebut adalah kombinasi pendekatan atas “situasi dan kondisi” (conditions), “norma-norma” (norms), dan “instrumen-instrumen (means) aksi kolektif. McAdam dkk.,¹⁰ mengidentifikasi tiga faktor yang saling berhubungan, yaitu mekanisme lingkungan (environmental), relasional, dan kognitif. Argumen utama mengapa perlu untuk meneliti kondisi-kondisi atau situasi adalah bahwa berhasil atau tidaknya aktivis gerakan dalam mengembangkan klaim-klaim tertentu, mobilisasi supporter, dan menyebarkan pengaruh adalah sangat tergantung pada konteks sosial politik. Dalam hal ini, kajian gerakan sosial fokus pada faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi kapasitas actor dalam menciptakan perubahan. Inilah yang kemudian dikenal sebagai struktur kesempatan politik yang menekankan signifikansi kesempatan politik yang terbuka celahnya ketika negara begitu rentan (*vulnerable*) sehingga memicu munculnya gerakan-gerakan sosial.

Kendatipun begitu, perlu dalam perhatian bahwa ketergantungan pada kesempatan politik saja tidak akan mampu menciptakan gerakan. Sebagaimana yang

¹⁰ Burhanudin Muhtadi; Doug McAdam, Sydney Tarrow & Charles Tilly, *Dynamics of Confrontation*, Cambridge University Press, New York, 2001, p.25-26.

diungkapkan oleh McAdam dan Snow,¹¹”situasi politik yang paling mendukung sekalipun hanyalah menciptakan potensi struktur tertentu bagi munculnya aksi kolektif”. Ketika kapasitas organisasi dan jejaring yang memadai tidak terpenuhi, maka potensi politik yang kondusif tersebut tidak akan terwujud dalam gerakan sosial. Jadi, studi tentang “alat atau instrument” (*means*) atau mekanisme relasional sangat penting bagi para aktifis, dalam rangka menyediakan infrastruktur pendukung yang dibutuhkan untuk aksi kolektif. Setidaknya ada tiga aspek infrastruktur yang sangat penting yaitu: basis keanggotaan, jejaring komunikasi, dan pemimpin atau tokoh gerakan. Kajian ini dikenal sebagai pendekatan *resource mobilization* (mobilisasi sumber daya).

Kemudian dalam pendekatan gerakan sosial juga ada proses “pembingkaihan aksi kolektif” yaitu penelitian menyeluruh terhadap mekanisme kognitif dan norma-norma yang sesuai dengan gagasan dan cita-cita bersama. Pembingkaihan adalah skema penafsiran yang “memungkinkan para pendukung gerakan sosial agar bisa memposisikan, menerima, dan menandai peristiwa-peristiwa.” Dengan kata lain, proses pembingkaihan menunjukkan “apa yang musti dilihat, apa yang dianggap penting, sehingga para aktifis mampu menjelaskan apa

¹¹ Burhanuddin Muhtadi, *Ibid.*, hlm.22-23

yang sedang terjadi.” Jadi, gagasan dan konstruksi keyakinan yang mendasari adanya gerakan sosial dinilai tak kalah penting dengan faktor mobilisasi sumber daya organisasi dan terbukanya proses kesempatan politik.

2. Tindakan Kolektif dan Kontestasi untuk Membentuk *Negotiated Order*

Teori tindakan kolektif Charles Tilly (1978) berpijak pada tiga asumsi. *Pertama*, tindakan kolektif menimbulkan biaya tertentu yang diperhitungkan oleh semua *contenders* (kelompok). *Kedua*, tindakan kolektif menghasilkan sumber daya kolektif. *Ketiga*, *contenders* senantiasa memperkirakan biaya dan manfaat yang sifatnya tidak pasti karena informasi tentang konstelasi lingkungan politik tidak lengkap, dan pihak-pihak yang terlibat memainkan strateginya masing-masing.

Tilly menggambarkan dinamika sebuah populasi dalam model lingkungan politik (*environmental polity model*). Dalam populasi terdapat *government*, *contenders*, *polity*, dan *coalition*. Para *contenders* aktif memperjuangkan kepentingannya, bermanuver, bersaing merebut kekuasaan, menyusun dan membubarkan koalisi, mengeksekusi strategi, dan akhirnya kalah atau menang, yang ditandai dengan keluarnya *contenders* dari, atau masuknya *contenders* ke dalam lingkungan politik.

Dalam gagasan Tilly, mobilisasi menempati peran sentral. Ia menegaskan bahwa tingkat keorganisasian sebagai aspek yang memiliki hubungan yang sangat erat dengan tingkat mobilisasi, ditentukan oleh *group inclusiveness* atau kohesi (solidaritas sosial).

F. Metodologi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif karena gejala (*fenomena*) yang diteliti merupakan gejala sosial-politik yang dinamis. Penelitian ini menggunakan dua sumber utama yaitu studi pustaka dan lapangan. Penelitian pustaka dilakukan dengan meneliti sejumlah buku, artikel, laporan penelitian, jurnal, tesis, dan disertasi. Di samping itu, penelitian pustaka juga dilakukan melalui eksplorasi elektronik (*internet*) dan media cetak (surat kabar dan majalah) yang berhubungan dengan subyek penelitian ini.

Penelitian lapangan (*field research*) juga dilakukan untuk memperoleh materi-materi penting seperti bukti dokumen PKS: arsip, jurnal, buletin, buku, dan atau pamflet. Adapun teknik penelitian yang digunakan adalah:

1. Observasi

Peneliti juga melakukan observasi terhadap peristiwa yang relevan dan melibatkan PKS; menghadiri *diskusi*, *browsing*, dan sebagainya yang berhubungan dengan subyek penelitian.

2. Berfikir Induktif

Penelitian ini bekerja dengan cara berfikir *induktif*, yaitu memecahkan masalah dengan menempuh cara berfikir sintetik yang pembuktian kebenarannya bersifat a posteriori. Cara ini bertolak dari berbagai pengetahuan dan fakta yang khusus atau peristiwa yang konkret, kemudian dari rangkaian fakta khusus itu ditarik *generalisasi* (pengetahuan yang umum).¹²

Dengan menggunakan metode deskriptif-kualitatif, analisis ini mencoba menggambarkan dan menguraikan keadaan suatu objek berdasarkan fakta-fakta yang nampak atau sebagaimana adanya.¹³ Usaha mendeskripsikan fakta-fakta itu pada tahap permulaan tertuju pada upaya mengemukakan gejala-gejala secara lengkap di dalam aspek yang dianalisis, agar jelas keadaannya.¹⁴ Oleh karena itu pada tahap ini fungsinya tidak lebih daripada penggambaran yang bersifat penemuan fakta-fakta sebagaimana adanya (*fact finding*), dan mengemukakan hubungan satu (variabel) dengan yang lain di dalam aspek-aspek yang diteliti itu.

¹² Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid 1 (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), hlm. 42-46

¹³ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998), hlm. 63-64

¹⁴ *Ibid.*, lihat Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 18-19

Pada tahap berikutnya analisis akan diberi bobot yang lebih tinggi yaitu dengan memberikan penafsiran yang *adequate* terhadap fakta-fakta yang ditemukan di lapangan. Dengan kata lain, metode ini tidak terbatas sampai pada tingkat pengumpulan dan menyusun data saja, tetapi meliputi juga analisa interpretasi mengenai makna data yang diperoleh.¹⁵ Oleh karena itu, analisis ini dipandang sebagai upaya untuk memecahkan masalah dengan mengadakan klasifikasi gejala, menilai gejala, menetapkan hubungan antargejala, dan sebagainya.¹⁶ Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa metode deskriptif-kualitatif merupakan langkah-langkah metodologis dalam melakukan “representasi” objektif tentang gejala-gejala yang nampak di dalam masalah yang diteliti dengan bersumber pada literature (buku, makalah, surat kabar, majalah, eksplorasi internet, dan atau yang sejenis) yang menyangkut PKS.

Terkait dengan objek kajian sebagaimana tersebut di atas maka pendekatan fenomenologis digunakan pula dalam menafsirkan “makna” data. Pendekatan fenomenologis dimaksudkan untuk meneliti data menurut bentuk-bentuk penampakkannya. Fenomenologis

¹⁵ Bandingkan Lexy Moleong, **Metode Penelitian Kualitatif** (Bandung: Rosda, 1999), hlm. 6.

¹⁶ Bandingkan dengan Anton Bakker, Achmad Charis Zuber, **Metode Penelitian Filsafat** (Yogyakarta: Kanisius, 1992), hlm. 54

menunjukkan proses “menjadi” dan kemampuan mengetahui bentuk-bentuk (gejala yang nampak) secara bertahap untuk menuju pengetahuan (makna) yang benar dari objek yang diamati. Singkatnya, pendekatan ini sebenarnya merupakan analisis deskriptif tentang esensi atau struktur ideal dari gejala-gejala yang nampak dalam suatu fakta sosial-politik PKS.¹⁷

Jadi, dengan metode ini diharapkan akan memperoleh interpretasi tentang PKS sebagai upaya menemukan dinamika politik Islam di Indonesia era reformasi.

G. Tahap-Tahap Pembahasan

Pembahasan laporan penelitian ini dibagi dalam beberapa bab sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian, dan pembahasan.

Bab II Dinamika Politik PKS, menjelaskan tentang sejarah lahirnya PKS di Indonesia; Dari Gerakan Dakwah Kampus Menuju Gerakan Politik Praktis, Pembingkai Transnasionalisme, Partai Keadilan, Partai

¹⁷ Noeng Muhadjir, ***Metodologi Penelitian Kualitatif*** (Yogyakarta: Rake Sarasen, 1996), hlm. 12-13

Keadilan Sejahtera, Sistem Kaderisasi dan Jejaring PKS,
Kader-kader Fenomenal PKS.

Bab III Analisis Ideologis dan Aksi Kolektif PKS,
mengungkapkan tentang orientasi ideologi Islamisme,

Bab IV Penutup yaitu berisi kesimpulan yang
merupakan jawaban dari uraian rumusan masalah.

BAB 2

DINAMIKA POLITIK PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

A. Sejarah Lahirnya PKS

Asal-usul PKS dapat ditelusuri dari gerakan dakwah kampus yang menyebar di Perguruan Tinggi Indonesia era 1980-an. Gerakan ini “dipelopori” oleh Muhammad Natsir, mantan Perdana Menteri Republik Indonesia dari Masyumi (yang dibubarkan pada 1960), dan mendirikan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) pada 1967. Lembaga ini awalnya fokus kepada usaha mencegah kegiatan misionari Kristen di Indonesia.¹⁸ Peran DDII yang paling krusial adalah kelahiran Lembaga Mujahid Dakwah yang berafiliasi dengan DDII, dipimpin Imaduddin Abdulrahim yang aktif melakukan pelatihan keagamaan di Masjid Salman, Institut Teknologi Bandung.¹⁹

PKS merupakan partai yang diprakarsai oleh para aktivis dakwah kampus. Para aktivis yang sebagian besar

¹⁸ Wikipaedia PKS: Thohir Luthfi, ***M. Natsir, Dakwah dan Pemikirannya (dalam bahasa Indonesian)***. Jakarta: Gema Insani. 1999.

¹⁹ Burhanuddin Muhtadi, ***Dilema PKS: Suara dan Syariah***. Jakarta, Indonesia: Kepustakaan Populer Gramedia KPG, 2012, hlm.32-33.

berusia muda tersebut bergerak dari dalam kampus (umumnya kampus umum) dan dalam skala terbatas di sekolah-sekolah. Di kampus mereka mendirikan dan mengelola pengajian yang diwadahi dalam bentuk Lembaga Dakwah Kampus (LDK). Lembaga inilah yang menyelenggarakan berbagai aktivitas keagamaan, baik berupa pengajian-pengajian untuk mahasiswa, maupun pengajaran Islam bagi para anggotanya. Di sekolah-sekolah, para aktivis ini berkiprah melalui lembaga kesiswaan yang sering disebut Rohani Islam (ROHIS). Kegiatan yang dilakukan di ROHIS sama dengan LDK, yakni memberikan pemahaman dasar-dasar Islam dengan penekanan pada penanaman semangat (*ghirah*) keislaman.

1. Dari Gerakan Dakwah Kampus Menuju Gerakan Politik Praktis

Pada masa-masa awal 1970-an hingga 1980-an, gerakan dakwah kampus tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi; dalam arti, berbagai kegiatan lebih sering dilakukan dengan diam-diam dan jika menyelenggarakan pengajian untuk banyak orang, mereka berkamufase dengan mengatasnamakan kegiatan mahasiswa. Kegiatan diam-diam ini dikenal sebagai kegiatan “usroh”. Usroh berarti keluarga, anggota pengajian ini dibagi ke dalam satuan-satuan kecil (6-10

orang yang disebut anak usroh) dengan seorang mentor (murabbi) dalam sistem stelsel.

Metode pengajian yang cenderung rahasia ini tidak terlepas kebijakan politik pemerintahan Orde Baru yang sangat represif terhadap gerakan keagamaan. Situasi sedikit berubah ketika memasuki era 1990-an di mana mulai muncul pergeseran politik ketika Soeharto mulai menempatkan para aktivis Islam sebagai sekutu. Meskipun demikian para aktivis LDK belum menempuh strategi gerakan yang terbuka. Dalam kondisi agak kondusif ini para aktivis LDK lebih leluasa melakukan dakwahnya dan mendapatkan sambutan lebih luas. Pada era ini, mereka tidak lagi menggunakan sebutan Usroh, tetapi mengubahnya menjadi Ikhwan dan menamai aktivitas mereka dengan sebutan Tarbiyah (pendidikan).²⁰

Gerakan Tarbiyah terdiri atas lima elemen penting: *pertama*, DDII²¹ dengan tokoh utamanya Mohammad

²⁰ Perubahan nama ini dimaksudkan untuk membedakan diri dari organisasi lain dalam dakwah kampus. Sebutan Usroh dipakai oleh banyak organ dakwah kampus, antara lain: HTI, Dakwah Salafi, dan NII. Selain itu, nama Usroh juga memiliki kesan radikal di mata masyarakat akibat keterkaitannya dengan jaringan Darul Islam yang diidentifikasi sebagai gerakan makar.

²¹ DDII sendiri merupakan transformasi dari Masyumi. Ia menjadi salah sarana alternatif bagi kalangan Masyumi setelah merasa gagal berdakwah lewat politik-kepartaian. Kegagalan ini ditandai dengan dibubarkannya Masyumi serta dipenjarakannya para tokoh sentral partai Islam ini menyusul tuduhan keterlibatan

Natsir. *Kedua*, elemen jaringan dakwah kampus (LDK) sebagai tulang punggung Tarbiyah dan sekolah (ROHIS). *Ketiga*, elemen para alumnus perguruan tinggi luar negeri, khususnya Timur Tengah. *Keempat*, para aktivis ormas Islam maupun kepemudaan Islam. *Kelima*, para dai lulusan pesantren. Lima elemen tersebut bergerak bersama-sama, saling mendukung dan menguatkan dengan fungsi dan peran masing-masing.

DDII ini berperan menjadi inisiator awal berdakwah melalui dan sekaligus peletak dasar-dasar strategi dakwah kampus sekaligus menyiapkan jaringan para pendamping LDK yang terdiri senior seangkatan Mohammad Natsir sendiri hingga para penerusnya, seperti Abu Ridlo, Husein Umar, dan Masyhadi. Jaringan LDK menjadi pelaku utama dakwah kampus dan menyediakan wahana dan mekanisme rekrutmen kader di kampus dan sekolah. Para dai alumni pesantren menjadi pengajar materi keislaman dan menjadi mentor pengamalan ajaran Islam

mereka dalam pemberontakan PRRI/Permesta dukungan CIA. Isyarat kegagalan lainnya adalah kenyataan ditolaknya pemberlakuan Piagam Jakarta pada sidang Konstituante tahun 1959 yang berarti bahwa lebih dari separo warga negara yang 90% muslim ini menolak pemberlakuan syari'at Islam. Berdasarkan alasan inilah Mohammad Natsir dan para tokoh sejawatnya memilih menyalurkan energinya untuk berdakwah. Setelah pembebasan mereka sebagai balas jasa atas kontribusi mereka mengantarkan Soeharto ke tampuk kekuasaan, para tokoh masyumi ini mendirikan DDII pada 1967.

sekaligus menyumbangkan pengalaman berdakwah di masyarakat. Para alumnus perguruan Tinggi Timur Tengah menjadi *transmitter* ideologi, *manhaj*, pemikiran, dan strategi Ikhwanul Muslimin. Para alumnus ormas kepemudaan Islam menjadi para organiser untuk menggerakkan organisasi dakwah. Sedangkan para alumnus Perguruan tinggi Barat menyediakan pemahaman atas konsep-konsep sosial, kebudayaan, ekonomi dan politik Barat. Mereka juga menawarkan *counter* atas konsep-konsep tersebut dan bila memungkinkan melakukan Islamisasi terhadapnya.

LDK sendiri bermula dari berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh Masjid Salman ITB di bawah mentoring Imaduddin Abdurrahim. Berbagai kegiatan ini, selain diikuti oleh para mahasiswa di sekitar Bandung, juga diikuti oleh mahasiswa dari kota-kota lain. Yang paling besar pengaruhnya adalah Latihan Mujahid Dakwah (LMD) yang diadakan pertama kali pada 1974. Kader-kader yang dibina melalui LMD dan usroh-usroh *ala* Masjid Salman tersebut tidak hanya berasal dari ITB saja, tetapi juga dari berbagai perguruan tinggi lain, seperti UI, UGM, dan IPB. Kegiatan LMD ini merupakan realisasi dari usaha DDII di bawah kepemimpinan Mohammad Natsir yang berobsesi menjadikan kampus sebagai sasaran dakwah. Pada 1968, DDII menyusun program pelatihan yang diperuntukkan

bagi instruktur universitas yang merupakan alumnus berbagai organisasi pelajar Islam. Kegiatan ini diawali dengan melatih 40 instruktur dari kampus ITB, Unpad, dan IKIP Bandung, UGM, dan kampus lain-lain yang digembleng di Pondok Haji Indonesia (Asrama Haji) Kwitang Jakarta. Para peserta ini direkrut dari- dan berkoordinasi dengan-HMI, PII, dan Muhammadiyah. Program ini dikoordinatori oleh KH. EZ. Muttaqien dengan seorang asisten program, Imaduddin Abdurrahim. Sedangkan pengkaderan tahap II dilakukan di Pesantren Darul Falah Bogor, pimpinan KH. Soleh Iskandar. Pada pengkaderan ini, giliran Prof Mukti Ali yang bertindak sebagai *project officer* dengan diasistensi oleh Dr. Sugiat (tokoh Muhammadiyah bidang kesehatan). Pengkaderan ini ditangani langsung oleh para petinggi DDII, seperti Mohammad Natsir, Mohammad Roem, dan Dr. Rasyidi. Selain tokoh senior tersebut, terdapat tokoh lain sebagai narasumber, seperti Oesman Ralibi, Zainal Abidin Ahmad, Mukti Ali, dan Alamsyah Ratu Perwiranegara.

Para alumnus dari pelatihan di PHI Kwitang ini kemudian membentuk “jaringan dai PHI” dengan Imaduddin sebagai koordinator nya. Mereka lantas mengembangkan pemikiran-pemikiran Islam yang mereka terima melalui berbagai forum pengkaderan di kampus masing-masing. Di antara jebolan PHI adalah Ahmad

Sadali, A.M. Luthfl, Endang Saefuddin Anshari, Rudi Syarif Surnadilaga, Yusuf Amer Faisal, Ahmad Noe'i'han, Miftah Faridh, dan Bang Imaduddin.²²

Kegiatan LMD ini merupakan realisasi dari usaha DDII di bawah kepemimpinan Mohammad Natsir yang berobsesi menjadikan kampus sebagai sasaran dakwah²³. Pada 1968, DDII menyusun program pelatihan yang diperuntukkan bagi instruktur universitas yang merupakan alumnus berbagai organisasi pelajar Islam. Kegiatan ini diawali dengan melatih 40 instruktur dari kampus ITB, Unpad, dan IKIP Bandung, UGM, dan kampus lain-lain yang digembleng di Asrama Haji Kwitang Jakarta. Para peserta ini direkrut dari-dan berkoordinasi dengan- HMI, PII, dan Muhammadiyah. Program ini dikoordinatori oleh KH. EZ. Muttaqien dengan seorang asisten program, Imaduddin Abdurrahim. Sedangkan pengkaderan tahap II dilakukan di Pesantren Darul Falah Bogor, pimpinan KH. Soleh Iskandar. Pada pengkaderan ini, giliran Prof. Mukti Ali yang bertindak sebagai *project officer* dengan diasistensi oleh Dr. Sugiat (tokoh Muhammadiyah bidang kesehatan). Pengkaderan ini ditangani langsung oleh para petinggi

²² M. Imdadun Rahmat, **Arus Baru Islam Radikal: Transmisi Revivalisme Islam Timur Tengah ke Indonesia**, (Jakarta: Erlangga Press, 2005), hlm. 121.

²³ Dalam konteks ini, DDII menerapkan tiga target utama dalam aktivitas dakwahnya : pesantren, masjid, dan kampus

DDII, seperti Mohammad Natsir, Mohammad Roem, dan Dr. Rasyidi. Selain tokoh senior tersebut, terdapat tokoh lain sebagai narasumber, seperti Oesman Ralibi, Zainal Abidin Ahmad, Mukti Ali, dan Alamsyah Ratu Perwiranegara.²⁴

Para alumnus dari pelatihan di PHI Kwitang ini kemudian membentuk “jaringan dai PHI” dengan Imaduddin sebagai koordinatornya. Mereka lantas mengembangkan pemikiran-pemikiran Islam yang mereka terima melalui berbagai forum pengkaderan di kampus masing-masing. Di antara jebolan PHI adalah Ahmad Sadali, A.M. Luthfi, Endang Saefuddin Anshari, Rudi Syarif Sumadilaga, Yusuf Amer Faisal, Ahmad Noe’i’han, Miftah Faridh, dan Bang Imaduddin²⁵

Pada 1974, DDII mengawali usaha berbasis kampus yang lebih baik, yang disebut Bina Masjid Kampus. Produk terpenting dari program ini adalah apa yang disebut Latihan Mujahid Dakwah (LMD) yang berbasis di Masjid Salman ITB²⁶. Program LMD ini kemudian dilakukan lagi beberapa

²⁴A.M.Lutfi, **“Gerakan Dakwah di Indonesia”, dalam Bang Imad, Pemikiran dan Gerakan Dakwahnya**, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002) him. 160-162.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 162.

²⁶ *Ibid.*; dalam Bang Imad, *Pemikiran dan Gerakan Dakwahnya*. Lihat juga Lukman Hakiem dan Tamsil Linrung, *Menunaikan Panggilan Risalah: Dokumentasi Perjalanan 30 Tahun*

kali dengan dimotori oleh para alumnus PHI di bawah koordinasi dan mentoring DDII. Dari LMD inilah lahir tokoh-tokoh PKS generasi, semisal Mutammimul Ula, Untung Wahono dan Tifatul Sembiring. Sebagai bagian dari program Bina Masjid Kampus ini, DDII mengusahakan pembangunan masjid di sekitar kampus guna dipakai untuk berbagai aktivitas dakwah. Dari usaha dan pendekatan DDII kepada pihak universitas, terbangunlah 15 masjid di dalam kampus atau yang berdekatan dengan kampus.²⁷

Di kemudian hari, masjid-masjid ini menjadi arena perjuangan para alumnus PHI dan kelak menjadi sentrum-sentrum pelopor gerakan LDK. Itu merupakan hasil dari gagasan Mohammad Nasir untuk membina mahasiswa melalui pembuatan infra struktur masjid, dan asrama mahasiswa di berbagai daerah, seperti Bandung, Yogyakarta, Padang, Lampung, dan Ujung Pandang. Para penghuni asrama inilah yang aktif memelopori kegiatan

Dewan Dakwah Islamiyyah Indonesia, (Jakarta: Media Dakwah, 1997).

²⁷ Masjid-masjid tersebut antara lain: Masjid Arif Rahman Hakim UI Salemba, Masjid Sultan Alaudin UMI Makassar, Islamic Center Al-Quds Padang, Masjid Fatahillah dekat kampus UI Depok, Masjid Al-Hijri Universitas Ibn Khaldun, Bogor, Masjid At-Taqwa IKIP Jakarta, Islamic Center Salahuddin Yogyakarta, Islamic Center Ibrahim Mailim Surakarta, Islamic Center Darul Hikmah dekat Unila Lampung, Islamic Center Ruhul Islam Magelang, Masjid Sultan Trenggono Semarang, Masjid AL-Furqon IKIP Bandung, Masjid IKIP Malang, Masjid ITS Surabaya, dan Masjid Al-Ghifari IPB Bogor.

keislaman di berbagai kampus. Di Bandung misalnya, para aktivis Masjid Salman merupakan embrio dari munculnya LDK itu sendiri. Di Jogja, para penghuni padepokan Budi Mulya merupakan inisiator shalat Jum'at di hall Bulak Sumur dengan mengatasnamakan Jama'ah Shalahuddin dan menjadi salah satu aktor penting LDK.²⁸

Selain itu, mengingat masjid kampus tersebut tersebar luas di Indonesia maka DDII menyusun sistem koordinator wilayah untuk suatu daerah. Di Yogyakarta, misalnya, dikoordinatori oleh M. Amin Rais, Kuntowijoyo, dan M. Mahyudin; untuk Bandung oleh Ahmad Sadali, Rudi Syarif Sumadilaga, dan Yusufllmer Faisal; untuk Jakarta oleh M. Daud Ali dan NurhayAbdurrahm1n; untuk Ujung Pandang oleh Halidzi dan Abdurrahman Basalamah; untuk Semarang adalah Kafiz Anwar cs., sedangkan untuk Bogor dikoordinatori oleh A. M. Saifuddin dan Abdul Qodir Djaelani²⁹. Di masa selanjutnya, bergabung juga beberapa orang dalam tim gerakan dakwah tersebut, antara

²⁸ Imdadun Rahmat, ***Ideologi PKS: Wawancara dengan Masyhadi***, (22 September 2007).

²⁹ Lukman Hakiem dan Tamsil Linrung, ***Menunaikan Panggilan Risalah: Dokumentasi Perjalanan 30 Tahun Dewan Dakwah Islamiyyah Indonesia***, (Jakarta: Media Dakwah, 1997), hlm. 63.

lain: Yahya Muhaimin, Douhak Latif, Endang Saifuddin Anshari, M. Nursal, dan Husein Umar.³⁰

Di masa selanjutnya hingga awal dekade 1980-an, perpaduan gerakan antara tokoh-tokoh senior DDII segenerasi M. Natsir para aktivis jebolan PHI, para koordinator wilayah, dan para alumnus LMD Salman telah berhasil mendorong meningkatnya semangat keagamaan di kampus-kampus, khususnya kampus umum. Secaralebih khusus, upaya yang mereka lakukan mendorong lahirnya kelompok-kelompok pengajian yang kemudian berkembang menjadi Lembaga Dakwah Kampus (LDK).

Gerakan yang dikembangkan di Masjid Salman itu mendapatkan penerimaan yang sangar luas. Hal tersebut dimungkinkan karena kader-kader yang pernah dibina di Masjid Salman kemudian menyebar ke seluruh pelosok Indonesia. Di berbagai kota besar yang lain, alumni-alumni Masjid Salman berusaha mengembangkan model kegiatan serupa. Selain Bandung sendiri, kita bisa menyebut beberapa kota yang menjadi pelopor kegiatan dakwah di kampus, antara lain Yogyakarta, jakarta. dan Bogor. Di Yogyakarta, metode dakwah dan kaderisasi yang hampir sama dirancang dan dikelola oleh para alumni Masjid Salman. Di kota ini telah bergiat tiga kelompok gerakan dakwah Islam, yakni kelompok Mardhiyyah (masjid

³⁰ AM Lutfi, "*Gerakan Dakwah di Indonesia*", hlm. 164.

kampus IKIP Yogyakarta), kelompok masjid Syuhada, dan kelompok jama'ah Salahuddin (mesjid Kampus UGM). Para aktivis tiga kelompok ini adalah para mahasiswa UGM, Universitas Islam Indonesia (UII), IKIP, IAIN dan Universitas Veteran (UPN).³¹

Masjid Salman asal Jakarta juga mengembangkan gerakan dakwah ini di UI. Di Masjid kampus UI Salemba, mereka mengembangkan program Integratif Studi Terpadu Islam (ISTI). Fakultas MIPA UI juga menamakan kegiatan mereka dengan ISTI. Di Fakultas Ekonomi mereka mendirikan Studi Islam Terpadu (SIT). Di FISIP dinamakan Kajian Dasar Islam (KADAIS). Sementara di Fakultas Sastra terdapat Forum Kajian Dasar Islam (FONDASI)³². Sedangkan di Bogor kegiatan ini berkembang di mesjid kampus IPB (Masjid Al-Ghifari). Kegiatan LDK di IPB ini kemudian melahirkan (selain gerakan Tarbiyyah) cikal-bakal HizbutTahrir Indonesia (HTI).³³

LDK-LDK generasi awal yang berada di ITB, UI, IPB, dan UGM ini menjadi tempat berlatih dan menimba ilmu para aktivis dari kampus-kampus lain. Alumnus dari

³¹ Lihat M. Imdadun Rahmat, *Arus Baru Islam Radikal* ..., hlm. 108 – 112.

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*, Hlm. 110-112.

pelatihan-pelatihan tersebut kemudian mengembangkan gerakan serupa di kampus asal mereka masing-masing. Demikian seterusnya, pola stelsel ini mempercepat persebaran dakwah Islam.

Dengan pola ini, aktivitas LDK di masa-masa selanjutnya menyebar ke universitas-universitas umum negeri terkemuka lainnya, seperti UNAIR Surabaya, UNDIP Semarang, USU Medan, dan UNHAS Makassar. Sebaran LDK juga berkembang pesat di universitas umum swasta. Yang sangat mencengangkan, pada akhir 1990-an, LDK juga mampu menembus ke kampus agama semisal IAIN dan perguruan tinggi Islam swasta yang selama ini menjadi basis intelektual kalangan pesantren. Di lahan baru ini, LDK semakin menunjukkan perkembangan pesat dan bahkan menjadi kekuatan mahasiswa yang dominan dengan menduduki posisi-posisi penting organisasi intra kampus.

Persebaran gerakan LDK yang cepat ini tidak lepas dari keikutsertaan para da'i DDII generasi pasca-Mohammad Natsir. Para dai penerus Mohammad Natsir di lingkungan Dewan Dakwah ini memberikan andil dalam mengisi kebutuhan nara sumber dan mentor pada forum-forum LDK. Sebagai aktivis dakwah yang dikader oleh generasi awal DDII, mereka memiliki pemahaman keislaman yang tinggi, mewarisi semangat perjuangan

Islam yang menggelora, dan memiliki pengalaman dakwah yang luas. Kemampuan inilah yang sangat dibutuhkan oleh para aktivis yang bergerak di LDK. Mereka, antara lain, Husein Umar, Syuhada Bakri, Abu Zakki, Hafidz, Muzayyin Abdul Wahhab, Masyhadi, Ahmad Sumargono, dan Anwar Halyono³⁴.

2. Pembinkaian Ideologi Transnasionalisme

Pada era 1980-an. pembinaan atas LDK oleh kader-kader DDII ini mengalami diskontinuitas. Kemudian dilanjutkan oleh para da'i baru, yakni para alumnus Timur Tengah yang kemudian mengarahkan pembinaan di LDK menjadi Tarbiyah.³⁵ Alumnus Timur Tengah memegang peranan penting, mereka memberikan semangat baru, menyumbangkan pemikiran, dan perbaikan dakwah kampus. Merekalah yang memformulasikan model pendidikan di LDK sehingga sistem pendidikan **Tarbiyah Ikhwanul Muslimin** diterima dan dikembangkan di kalangan aktivis dakwah kampus. Pada saat kehadiran merekalah (akhir 1980-an) sebagian besar jaringan LDK memilih orientasi ke Ikhwanul Muslimin. Selain menerjemahkan buku-buku Ikhwanul Muslimin, para

³⁴ Imdadun Rahmat, **Ideologi PKS**: Wawancara dengan Ahmad Sumargono pada 19 September 2007 dan wawancara dengan Masyhadi pada 22 September 2007.

³⁵ *Ibid.*, Imdadun Rahmat, **Ideologi PKS** :Wawancara dengan Masyhadi pada 22 September 2007

aktivis generasi pertama PKS, seperti Salim Al-Jufri, Rahmat Abdullah, Abu Ridlo, dan Helmi Aminuddin, serta generasi kedua PKS, seperti Hidayat Nur Wahid, Yusuf Harun, Abdul Hasib, Nasir Zein, Surahman Hidayat, Satori Ismail, dan Daud Rasyid juga aktif dalam membina kelompok-kelompok Tarbiyah. Mereka bahu-membahu dengan para aktivis yang berasal dari era awal LDK yang pada umumnya berasal dari perguruan tinggi umum di Indonesia.

Para alumnus Timur Tengah berperan menjadi tenaga-tenaga *murabbi* (pendidik) yang mengisi ceramah dalam pertemuan-pertemuan tersebut. Alumni Timur Tengah yang memiliki kelebihan dalam penguasaan terhadap pemikiran Ikhwanul Muslimin menjadi ideolog-ideolog yang handal. Selain itu, mereka juga menjadi penceramah di radio, televisi, menulis buku, mengelola penerbitan dan menjadi nara sumber di seminar-seminar yang diikuti oleh kalangan luas.

Intensitas pengumpulan alumnus Timur Tengah meningkat ketika aktivis generasi ketiga seangkatan dengan Annis Matta, Aunurrofiq, Jazuli Juwaini, dan Muhammad Syamlan berdatangan dari Timur Tengah maupun LIPIA Jakarta. Kehadiran generasi yang lebih muda lulusan Timur Tengah di gerakan Tarbiyah ini memberikan banyak kemajuan bagi persebaran jaringan dakwah dan kedalaman

materi dakwah. Sejak mereka ikut memperkenalkan pemikiran-pemikiran Ikhwanul Muslimin, banyak mahasiswa yang kemudian lebih serius menekuni dan mendalami materi maupun *manhaj* dakwah Ikhwanul Muslimin.

Kehadiran para alumnus Timur Tengah ini juga berkontribusi merumuskan sebuah sistem pengkaderan dalam konteks Tarbiyah. Hal ini menyebabkan mudahnya penerimaan terhadap *manhaj* gerakan dakwah Tarbiyah karena sistematikanya lebih tertata dengan baik. Pelatihan keislaman seperti LMD menghasilkan banyak aktivis muda Islam yang lebih bersemangat. Dari proses ini lahirlah tokoh-tokoh generasi ketiga PKS yang datang dari kampus umum. Mahfudz Siddik, Muzammil Yusuf Radzikun, Fahri Hamzah, Mustafa Kamal, Zulkiflimansyah, Priatna, Suswono, dan Rama Pratama adalah sebagian dari mereka. Ekspresi kesemangatan itu terlihat dari keinginan kuat mereka untuk terus mencari dan mempelajari banyak hal berkaitan dengan Islam dan perjuangan Islam.

Selain pemakaian sistematika yang lebih baik, utuh, mendalam, dan lebih kaya dalam penyampaian materi, kehadiran mereka juga memperkaya pendekatan dan jenis-jenis kegiatan. Melalui kegiatan yang beraneka ragam, seperti *liqo*, *mabit*, *rihlah*, *khaoymah*, seminar dan bedah

buku, gagasan-gagasan mereka tersebar lebih luas' transformative, dan lebih mudah tersosialisasikan.

Selain itu, bersama para aktivis Tarbiyah jaringan dakwah kampus, mereka juga membentuk lembaga-lembaga dakwah yang memberikan sumbangan tidak kecil bagi keberhasilan dakwah. Lembaga-lembaga yang mereka dirikan, antara lain: lembaga bimbingan belajar "Nurul Fikri", lembaga dakwah "Khoiru Ummah", lembaga pendidikan Islam 'Al-Hikmah", lembaga pengkajian "Sidik" kelompok-kelompok kesenian Nasyid, dan majalah "Sabili". Sementara berbagai penerbit buku, yang ikut menyebarkan gagasan dan pemikiran mereka, antara lain: Al-Ishlahy Press, Gema Insani Press, Pustaka Al-Kautsar, Robbani Press, Itishom, Era Intermedia, dan As-Syamil.³⁶

Dalam persebaran Tarbiyah tersebut', juga terdapat andil para da'i lulusan Timur Tengah yang berkultur pesantren. Para da'i yang telah memiliki pengalaman mengajar agama dan ber-tabligh di tengah, masyarakat ini menambah kualitas pendidikan dan peng-kaderan di Tarbiyah. Selain itu, para dai ini juga memperluas wilayah edar (ekspansi) Jama'ah Tarbiyah ke pesantren-pesantren dan juga ke masyarakat luas. Tokoh-tokoh seperti KH.Rahmat Abdullah (lulusan pesantren Asy-Syafi'iyah),

³⁶ M. Imdadun Rahmat, *Arus Baru Islam Radikal ...*, hlm. 122-123.

KH.Didin Hafiedhudin, KH.Ahzami Sami'un, KH. Muslih Abdul Karim; dan KH. Yusuf Supendi, adalah contoh dari elemen pesantren ini.

Di kalangan aktivis Tarbiyah juga terdapat tokoh-tokoh yang selain aktif di Tarbiyah juga aktif di organisasi mahasiswa Islam, seperti PII, GPI, IMM, HMI, dan PMII. Para kader yang memiliki kemampuan kepemimpinan dan pengorganisasian ini juga turut berperan dalam mengisi kepemimpinan dan menggerakkan roda organisasi di Tarbiyah.

Kombinasi kerja yang kompak dari lima elemen utama Tarbiyah yang sebagian besar didukung oleh orang-orang berkultur modernis (Masyumi) dan mahasiswa perguruan tinggi umum yang *ghalib*-nya berasal dari keluarga berkultur *abangan* ini menghasilkan pertumbuhan jaringan dakwah yang makin lama makin dahsyat. Dilihat dari pertumbuhan jaringan dakwah kampus, perkembangan anggota dan persebarannya, menunjukkan tingkat akselerasi yang mengagumkan.

3. Partai Keadilan

Sekitar tahun 1985, rezim Orde Baru mewajibkan seluruh organisasi massa untuk menjadikan **Pancasila** sebagai asasnya. Ini membuat sejumlah tokoh Islamis berang dan menyebut rezim Soeharto telah memperlakukan

politik Islam sebagai *kutjing kurap*.³⁷ Pada saat yang sama, *Jamaah Tarbiyah* meraih momentumnya di kalangan mahasiswa *lantai masjid kampus*, sebutan untuk para aktivis Muslim di masjid-masjid kampus. Pada tahun 1993, Mustafa Kamal, seorang kader *Jamaah Tarbiyah*, memenangi pemilihan mahasiswa untuk Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, kader pertama yang memegang kekuasaan di level universitas.³⁸ Setahun kemudian, Zulkieflimansyah, juga kader *Jamaah Tarbiyah*, menjadi Ketua Senat Mahasiswa di universitas yang sama.

Para anggota *Jamaah Tarbiyah* tersebut di atas, kemudian mendirikan Lembaga Dakwah Kampus, yang kemudian menjadi unit-unit kegiatan mahasiswa yang resmi di berbagai kampus sekuler di Indonesia, terutama oleh para aktivis Forum Studi Islam. Saat itu, kata *usrah* yang sering dipakai untuk menyebut kelompok-kelompok kecil

³⁷Burhanuddin Muhtadi, *Dilema PKS: Suara dan Syariah*. Jakarta, Indonesia: Kepustakaan Populer Gramedia KPG, 2012, hlm.38-44. Bandingkan Yon Machmudi, *Islamising Indonesia: The Rise of Jemaah Tarbiyah and the Prosperous Justice Party (PKS)*. Canberra: Australian National University Press.2008

³⁸*Ibid*. Lihat Sejarah awal FSDK di situs resmi LDK Insani Universitas Diponegoro.

³⁹WikiPKS; Richard Kraince. "The Role of Islamic Student Groups in the Reformation Struggle: KAMMI". *Studia Islamika*, vol. 7, no. 1, 2000

pengajian di LDK mulai diasosiasikan dengan kelompok *Islam radikal* seperti *Darul Islam*, yang menggunakan sistem sel ala *Ikhwanul Muslimin* untuk merekrut kader.

Kendatipun ada berbagai faksi dan kubu di dalam tubuh LDK, semuanya sepakat membentuk Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus (FSLDK) pada tahun 1986. Pertemuan jaringan LDK di UGM Yogyakarta diikuti oleh 13 perguruan tinggi. Sementara pada 1987, pertemuan kedua dilakukan di ITB Bandung dan diikuti oleh lebih banyak lagi peserta. Di tahun yang sama, pertemuan ketiga diadakan di Unair Surabaya dan dihadiri oleh wakil-wakil dari 30 LDK. Pada pertemuan ini mulai digunakan nama Forum Silaturrahi Lembaga Dakwah kampus (FS-LDK).

Pada tahun 1988, pertemuan jaringan LDK keempat diadakan di Solo dengan tambahan peserta dari Universitas Udayana Bali dan Unhas Makassar. Kemudian, pada pertemuan kelima yang diselenggarakan di IKIP Malang (1989), peserta pertemuan meluas lagi dengan hadirnya utusan dari Sumatera, Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya, pertemuan-pertemuan semacam ini dilakukan secara berkala untuk membahas berbagai strategi pengembangan dan perluasan LDK serta mencari solusi

bagi persoalan-persoalan yang muncul.³⁹ Pada tahun 1998, jaringan ini telah menyebar ke enam puluh empat perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Di sebagian besar perguruan tinggi tersebut, para aktivis dakwah Tarbiyah ini bahkan menjadi kekuatan yang dominan dalam dunia kemahasiswaan dan menempati posisi penting dalam organisasi intra kampus.⁴⁰

Pertemuan tahunan kesepuluh FSLDK di Malang pada tahun 1998 dimanfaatkan untuk deklarasi Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), sebagai bentuk respon perkembangan politik Indonesia⁴¹. Kesatuan mahasiswa yang didukung para kader Tarbiyah ini menjadi salah satu kekuatan mahasiswa yang cukup diperhitungkan saat gerakan mahasiswa menggulingkan rezim Soeharto. Selain jumlah mereka yang besar, para pemimpin kesatuan ini juga merupakan kader kampus yang menonjol dan *militan*, sehingga mampu memerankan komunikasi publik yang efektif.

³⁹ Mahfudz Siddiq, ***KAMMI dan Pergulatan Reformasi***: Kiprah Politik Aktivis Dakwah Kampus dalam Perjuangan Demokratisasi di Tengah Gelombang Krisis Nasional Multidimensi, (Solo: Era Intermedia, 2003), him. 75-77.

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Mahfudz Sidik, ***KAMMI dan Pergulatan Reformasi ...***, hlm. 95-96.

Pola aksi mahasiswa yang simpatik juga menambah daya tarik dan daya dobrak KAMMI guna meraih dukungan masyarakat untuk bersama-sama menggulingkan rezim Orde Baru. KAMMI muncul sebagai salah satu organisasi yang paling vokal menyuarakan tuntutan reformasi melawan Soeharto, dipimpin oleh Fahri Hamzah. Setelah setelah mundurnya Soeharto pada 21 Mei 1998, para tokoh KAMMI telah mempertimbangkan berdirinya sebuah partai Islam. Pada bulan Agustus 1998, para kader Jama'ah Tarbiyah membentuk partai politik bernama Partai Keadilan (PK). Partai Keadilan dideklarasikan di Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta, pada tanggal **20 Juli 1998**, dan mengangkat Nurmahmudi Isma'il sebagai presiden pertamanya.

Kendatipun begitu, tokoh *elite* KAMMI yang memiliki kontribusi dalam pembentukan PK, KAMMI dan PK secara tegas menyatakan bahwa tidak ada hubungan formal struktural.⁴² Nurmahmudi kemudian, ditawarkan jabatan Menteri Kehutanan di Kabinet Persatuan Nasional bentukan Presiden Abdurrahman Wahid pada Oktober 1999. Ia menyetujui tawaran tersebut dan menyerahkan jabatan presiden partai kepada Hidayat Nur Wahid, seorang

⁴² Yon Machmudi, *Islamising Indonesia: The Rise of Jemaah Tarbiyah and the Prosperous Justice Party (PKS)*. Canberra: Australian National University Press. 2008

doktor alumnus Universitas Islam Madinah, sejak 21 Mei 2000.

Kelahiran PK didahului dengan pro dan kontra di kalangan internal mereka. Persoalan mendirikan partai ini menjadi agenda yang penting dibicarakan: sebagian mengatakan perlu mendirikan partai politik, sementara sebagian yang lain menyarankan tidak perlu. Persoalan ini kemudian menjadi pembahasan yang cukup panjang. Sebagian berpendapat bahwa era reformasi yang membuka keran kebebasan untuk berekspresi merupakan peluang yang baik untuk meningkatkan tahap perjuangan pada *mihwar siyasi*. Akan tetapi, sebagian menyarankan bahwa capaian yang diraih belum cukup untuk mewujudkan partai politik.

Musyawarah untuk membentuk partai politik pada Jamaah Tarbiyah terjadi setelah Dewan Dakwah gagal membuat satu partai politik yang berasaskan Islam. Lahimya Partai Bulan Bintang dengan asas Pancasila membuat sebagian anggota Dewan Dakwah yang terlibat merumuskan partai Islam merasa kecewa. Pada saat itu, menurut Abu Ridlo, jamaah yang kini menjadi Partai Keadilan, sesungguhnya sedang menunggu dan memperhatikan Dewan Dakwah yang akan membidani lahirnya partai politik Islam. Akan tetapi, ketika partai politik yang diklamirkan tidak berasaskan Islam maka

mereka pun kemudian mengadakan musyawarah tersendiri.⁴³

Dalam situasi yang penuh silang pendapat tentang perlu tidaknya partai politik, musyawarah pun kemudian diperbesar dengan mengadakan sebuah survei, jajak pendapat berupa polling. Adapun respondennya terdiri dari kalangan aktivis dakwah kampus (yang pernah dibina atau para mantan aktivis dakwah kampus) yang tersebar di berbagai perkantoran. Dengan memperbesar jangkauan musyawarah diharapkan akan muncul masukan yang lebih objektif. Dan, pertanyaan survei lebih difokuskan untuk mengetahui keinginan para aktivis dakwah ini dalam menyikapi arus informasi. Satu di antaranya yang ditanyakan adalah tentang perlu tidaknya mendirikan sebuah partai politik. Dari pertanyaan yang disebarkan kepada 6.000 orang /responden pada seluruh komponen aktivis dakwah, sebanyak 5.800 pertanyaan kembali. Dari 5.800 responden tersebut, 86% lebih menginginkan untuk mendirikan partai politik. Sementara 27% sisanya menginginkan untuk mendirikan mempertahankan organisasi masyarakat, dan sisanya menginginkan mempertahankan habitat semula, yaitu dalam bentuk

⁴³ Aay Muhammad Furqon, *Partai Keadilan Sejahtera: Ideologi dan Praksis Politik Kaum Muda Muslim Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Teraju, 2004), hlm. 142.

yayasan, LSM, kampus pesantren, dan berbagai lembaga lainnya.

Hasil jajak pendapat yang menunjukkan bahwa suara mayoritas kalangan Tarbiyah menghendaki dibentuknya partai politik ini mendorong 52 aktivis Tarbiyah bermusyawarah yang akhirnya memutuskan untuk mendirikan partai politik. Berdasarkan hasil musyawarah, partai yang baru didirikan itu diberi nama Partai Keadilan (PK). Musyawarah tersebut diketuai oleh Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid dan bertindak sebagai sekretaris adalah H. Luthfi Hasan Ishaq, MA. Selanjutnya, PK melakukan musyawarah partai dan mengangkat Dr. Nur Mahmudi Ismail sebagai presiden partai dan Dr. Salim As-Segaf Al-Jufri sebagai ketua Dewan Syura partai. Sedangkan sekretaris jenderal dipercayakan kepada Anis Matta Lc.

Sebagai tindak lanjut dari deklarasi ini, PK melakukan upaya membangun struktur dari Dewan Pengurus Pusat (DPP) di tingkat nasional, Dewan Pengurus Wilayah (DPW) di tingkat propinsi Dewan Pengurus Daerah (DPD) di tingkat kabupaten/ kota, Dewan Pengurus Cabang (DPC) di tingkat kecamatan, dan Dewan Pengurus Ranting (DPRa) di tingkat desa/kelurahan. Adapun modal awal dan sekaligus tulang punggung terbangunnya struktur dari pusat hingga daerah adalah para kader Tarbiyah. Merekalah yang mengisi kepengurusan dan menjadi kader-

kader PK yang handal. Pada masa-masa awal didirikannya PK, kader Tarbiyah mencapai 42.202 orang. Jumlah ini terdiri dari kader inti sebanyak 2.371 orang, dan kader pendukung sebanyak 39.831. Kader inti terdiri dari 120 anggota ahli dan 2.251 anggota dewasa, dengan komposisi jenis kelamin 2.049 laki-laki dan 322 perempuan.⁴⁴

Dalam waktu yang relatif singkat, PK berhasil membangun kepengurusan partai dan memenuhi persyaratan mengikuti pemilu. Dalam keikutsertaan yang pertama dalam Pemilu 1999 ini PK berhasil menjangkit 1.436.565 suara atau sekitar 1,36% dari keseluruhan jumlah suara. Dari perolehan suara pada pemilu pertama setelah era reformasi ini, tujuh orang wakil PK duduk di kursi DPR pusat.

Pada perkembangan berikutnya, PK terus berbenah dan memperkuat dirinya. Hal ini terkait dengan kenyataan bahwa capaian suara pada Pemilu 1999: (*lihat tabel perolehan suara*) tidak memungkinkan bagi *sustainibilitas* partai ini. Ketentuan *electoral threshold* mengharuskan sebuah partai melewati perolehan 2% jika ingin mengikuti pemilu berikutnya. Berdasarkan UU Pemilu 1999, bab VII, pasal 39 mengenai syarat keikutsertaan dalam pemilu, Partai Keadilan tidak diperbolehkan mengikuti pemilihan

⁴⁴ Reform Institute, hlm. 80.

umum 2004, kecuali jika PK mau bergabung dengan partai lainnya, atau mendirikan partai politik baru.

Atas ketentuan tersebut, dan setelah gagal melakukan lobi di parlemen untuk menurunkan batas *electoral threshold*, PK akhirnya menempuh jalan menolak ketentuan tersebut dengan menempuh jalan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi bersama partai-partai lain yang tidak lolos.⁴⁵ Langkah antisipasi yang dilakukan PK untuk mengikuti Pemilu 2004 tidak hanya mengajukan peninjauan ulang mengenai *electoral threshold*, tetapi juga mempersiapkan berdirinya partai baru, jika gagal dalam memperjuangkan pengurangan batas ketentuan tersebut. Oleh karena itu, dalam sebuah rapat pleno tahun 2001 dicari cara lain untuk meneruskan dakwah melalui jalur politik. Dalam rapat tersebut, muncul dua pemikiran: *pertama*, pendapat agar PK menjadi organisasi massa, *kedua*, pendapat yang menginginkan membuat partai baru yang simbolnya tak jauh berbeda dengan Partai Keadilan. Pendapat kedua inilah yang akhirnya dipilih.⁴⁶

4. Partai Keadilan Sejahtera

Perumusan mengenai pembentukan partai baru ini diserahkan kepada sebuah tim yang dipimpin oleh

⁴⁵ Aay Muhammad Furqon, *Partai Keadilan Sejahtera ..*, hlm. 289.

⁴⁶ *Ibid.*

Muzammil Yusuf. Dalam berbagai rapat yang cukup dinamis, disepakati untuk menambahkan kata “Sejahtera” sebagai nama partai baru tersebut. Jadi, jika digabung dengan nama Partai Keadilan akan menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Tambahan ini dipilih dengan pertimbangan filosofis bahwa partai baru yang akan lahir tidak semata-mata menekankan pada perjuangan menegakkan keadilan dalam ranah hukum pada tingkat politik, tetapi juga menyelesaikan persoalan tentang belum tercapainya kesejahteraan di kalangan masyarakat bawah.⁴⁷

PKS secara resmi berdiri pada **20 April 2002**, sebagai langkah strategis dalam menjawab hambatan menyangkut *electoral threshold*. Dengan demikian maka visi dan misi partai tidak bergeser dari *khittah* PK dan walaupun ada perbedaan hanya dalam bentuk redaksional dan teknis semata. Atas dasar kesamaan visi dan misi tersebut, musyawarah Majelis Syura Partai Keadilan ke-XIII yang berlangsung di Wisma Haji, Bekasi, Jawa Barat, pada 17 April 2003, memutuskan Partai Keadilan menggabungkan diri dengan Partai Keadilan Sejahtera.

Pada saat deklarasi, Partai Keadilan Sejahtera memiliki pengurus di 30 DPW, 312 DPD, dan 2155 DPC di seluruh Indonesia. Selain itu, PKS juga memiliki 13 perwakilan di luar negeri yang disebut dengan Pusat

⁴⁷ *Ibid.*

Informasi Partai Keadilan Sejahtera (PI-PKS).⁴⁸ Sejatinya, perubahan nama PK ke PKS hanyalah semata-mata perubahan nama untuk menyiasati agar bisa mengikuti Pemilu 2004. Oleh karena itu, suprastruktur (ideologi, pemikiran, dan konsep-konsep partai), maupun infrastruktur PKS (jaringan kader, kepengurusan hingga aset-aset partai) adalah pelimpahan dari PK.

Belajar dari “kegagalan” pada Pemilu 1999, PKS menempuh upaya perekrutan kader dan simpatisan dengan ekstra keras. PKS juga mengubah strategi dengan menampilkan citra yang lebih inklusif dengan mengangkat isu-isu yang relevan bagi seluruh elemen masyarakat; tidak terbatas hanya pada kalangan kader Tarbiyah. Perekrutan dan pengkaderan PKS yang tetap mengandalkan gerakan Tarbiyah ini menunjukkan perkembangan yang sangat cepat. Jika pada awal berdirinya (1998) partai ini memiliki kader 42.202 orang maka pada 2004 pertumbuhan kader (inti maupun pendukung) berjumlah 394.190 orang. Artinya, pertumbuhan kader yang dibangun selama lima tahun mencapai 834 persen⁴⁹.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 291 – 292.

⁴⁹ Reform Institute, *Studi Monografi Partai Politik Keadilan Sejahtera*. (Final report penelitian ini tidak diterbitkan), hlm. 80 – 81.

Kader-kader partai tersebut tersebar di seluruh propinsi di Indonesia dengan Jawa Barat sebagai kantong terbesar kader (berjumlah 59.595 orang). Jawa Tengah menduduki urutan kedua dengan 52.793 kader, disusul DKI Jakarta dengan 52.287 sebagai urutan ketiga. Selanjutnya, secara berurutan Sulawesi Selatan dengan 37.909 kader, Maluku: 28.146 kader, DI Yogyakarta: 25.415 kader, Jawa Timur: 16.578 kader, Maluku Utara: 15.552 kader, Sulawesi Tengah: 12.047 kader, Banten: 11.632 kader, dan Lampung: 10.386 kader. Selebihnya, kader-kader tersebut tersebar di propinsi lain dengan kisaran jumlah di bawah 10.000 orang hingga 300-an kader.

Peningkatan jumlah kader PKS yang sangat signifikan ini ternyata juga paralel dengan peningkatan perolehan suara dalam Pemilu 2004. Pada Pemilu 2004 ini PKS meraih suara sangat signifikan, yakni 8.325.020 suara (7,3% dari total suara). Jumlah kursi PKS di DPR Pusat juga melonjak menjadi 45 kursi. Partai ini juga mendudukkan wakilnya di DPRD provinsi sebesar 157 orang, dan di DPRD Kabupaten Kota sebesar 900 orang. Sebuah jumlah yang sangat signifikan. Bahkan, mantan presiden partai ini Hidayat Nur Wahid mampu menduduki kursi ketua MPR.⁵⁰ Oleh karena itu, Partai Keadilan Sejahtera bisa dikatakan merupakan “keajaiban politik” di

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 83.

Indonesia. Ia mengungguli partai-partai baru yang lain, yang memiliki sejarah lebih tua. Hanya dalam waktu 20 tahun, gerakan dakwah kampus ini telah berkembang menjadi partai yang diperhitungkan dan diramalkan akan terus berkembang cepat.

Unsur penting lain dalam PKS adalah simpatisan. Simpatisan adalah mereka yang tidak mengikuti pengkaderan partai dan juga tidak memiliki latar belakang pendidikan Tarbiyah. Unsur inilah yang mengisi kotak suara pemilu PKS hingga mampu memposisikan dirinya sebagai salah satu partai penting. Simpatisan PKS mewujudkan dukungannya melalui keikutsertaan dan dukungan mereka terhadap aktivitas partai dan yang paling nyata adalah melalui pencoblosan pada pemilihan umum, baik Pemilu Legislatif, Pilpres, maupun Pilkada. Sebagaimana jumlah kader yang meningkat dengan cepat, demikian juga jumlah simpatisan partai ini mengalami peningkatan yang sangat cepat. Pada Pemilu 1999, partai ini (saat itu masih bernama PK) meraih 1,4 juta suara (1,43%) nasional. jika jumlah ini dikurangi oleh jumlah kader sebesar 42.202 maka kita dapatkan jumlah simpatisan partai ini sebesar 1.350.000-an orang. Pada Pemilu 2004, yang saat itu memiliki 394.190 kader, PKS meraih suara sebesar 8.325.020 orang. Dengan demikian, pada 2004 simpatisan PKS melonjak hampir 8 juta orang. Jadi,

kenaikan simpatisan PKS dalam kurun waktu 5 tahun mencapai sekitar 580 persen.

Dalam Pemilu 2009 yang lalu, walaupun perolehan suara PKS menurun yaitu 8.206.955, tetapi prosentasenya sedikit meningkat menjadi 7,38% karena akibat penurunan jumlah suara sah. Sebagian kalangan, baik internal PKS maupun eksternal melihat stagnasi perolehan suara PKS sebagai sinyal menguatnya dinamika internal partai itu, terutama pasca Pemilu 2004.⁵¹

Sebagai partai modern, PKS mengembangkan struktur partai yang sistemik. PKS membangun struktur kepengurusan partai dari Pusat di Jakarta, hingga di desa-desa. Di masing-masing tingkatan terdapat struktur yang dirancang baik secara struktural maupun fungsional. Namun demikian, struktur kepengurusan yang mapan baru terjadi di wilayah-wilayah perkotaan, sementara di daerah pedesaan masih lemah. Pengembangan jaringan kepengurusan PKS didukung oleh piranti kultural pengajian Tarbiyah dengan sistem stelsel yang dilakukan secara swadaya oleh para dai Tarbiyah, dan juga oleh piranti institusional, yakni sistem pengkaderan resmi yang dilakukan dan didanai oleh para pengurus PKS.

⁵¹ Arief Munandar, *Antara Jemaah Dan Partai Poltiik: Dinamika Habitus Kader PKS dalam Arena Politik Indonesia Pasca Pemilu 2004*, (Jakarta: Universitas Indonesia:2011), hlm.,1

Jadi, sangat wajar jika perkembangan PKS terjadi secara baik di daerah-daerah perkotaan (khususnya kota besar yang berperguruan tinggi) dan kurang berkembang di kota-kota kecil, apalagi di desa-desa. Meski demikian, para aktivis PKS yakin bahwa secara politik hal ini tetap memiliki nilai strategis..⁵²

Tabel Perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera pada Pemilu Legislatif Indonesia 1999, 2004 dan 2009					
Tahun	Suara	%	Kursi	%	+/-
1999	1,436,565	1.36	7	1.51	n/a
2004	8,325,020	7.34	45	8.18	+38
2009	8,204,946	7.88	57	10.18	+12

B. Sistem Kaderisasi dan Jejaring PKS.

PKS menggunakan modus operandi Jamaah Tarbiyah untuk memperbesar peluang mendapatkan kader baru.⁵³ PKS memakai dua strategi dalam merekrut kader. *Pertama* adalah pola rekrutmen individual (*al-da'wah al-fardhiyyah*), atau bentuk pendekatan *persuasif* orang per

⁵² *Ibid.*, hlm. 84.

⁵³ Nur Khafifah, "Tetap di PKBIB, Yenny Larang Kader Merapat ke PKB dan PKS". **Detik.com**, 16 April 2013

⁵⁵ "Tanggapi Yenny, Anis: PKS Juga Ahlu Sunnah". **Republika**, 17 April 2013

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ Abdul Aziz, "PKS bantah beraliran Wahabi". **Antara**, 4 Juni 2013

orang, meliputi komunikasi personal secara langsung. Calon kader yang akan direkrut diajak berpartisipasi dalam forum-forum pembinaan rohani yang diorganisir PKS seperti *usrah* (keluarga), *halaqah* (kelompok studi), *liqa* (pertemuan mingguan), *rihlah* (rekreasi), *mukhayyam* (perkemahan), *daurah* (pelatihan intelektual) dan *nadwah* (seminar). Sistem yang digunakan PKS ini mirip dengan sistem rekrutmen gerakan Islamis di Mesir. *Kedua* adalah pola rekrutmen institusional (*al-da'wah al'amma*). PKS berafiliasi dengan berbagai organisasi sayap yang berstatus formal atau tidak formal, sehingga partai dapat memanfaatkan institusi-institusi ini untuk meraup kader potensial.⁵⁴

PKS mewajibkan kadernya terlibat aktif dalam pelatihan hierarkis yang disebut *marhalah*. Pelatihan ini mencakup proses pembelajaran (*ta'lim*), pelatihan keorganisasian (*tandzim*), pembinaan karakter (*taqwin*) dan evaluasi (*taqwim*).⁵⁵ Dalam sumpahnya sebagai anggota PKS, kader harus mengucapkan **baiat** secara lengkap dengan membaca *dua kalimat syahadat*. Dengan demikian, sistem sumpah ini tidak memungkinkan non-Muslim

⁵⁸ *Op.Cit.*

⁵⁹ Nur Khafiah, *Op.Cit.*

⁶⁰ Tanggapi Yenny, *Op.Cit.*

menjadi kader PKS⁵⁶ Namun sesuai hasil Munas 2010 di Jakarta, PKS membedakan antara kader dan anggota. **Kader** adalah **anggota** yang terikat oleh sistem kaderisasi, sehingga sudah pasti seorang Muslim. Sementara **anggota** adalah siapa saja yang terikat kepada organisasi dan bersifat lebih umum dan terbuka.

Berbagai upaya keras ini berbuah manis. Perekrutan dan pengkaderan PKS yang tetap mengandalkan gerakan jam'ah Tarbiyah ini menunjukkan perkembangan yang sangat cepat. Mereka mendukung dan memilih PKS dalam pemilu karena merasa cocok dengan apa yang dicitrakannya. Selain dari masyarakat umum yang tidak berafiliasi ke ormas keagamaan tertentu, simpatisan PKS juga berasal dari kalangan Islam tradsionalis, Islam modernis maupun kalangan Islam fundamentalis dn radikal, seperti HTI, MMI, NII, Jundullah, Dakwah Salafi, dan kelayakaran Islam lainnya. PKS yang bermula dari kampus dengan pendukung kalangan mahasiswa ini telah berhasil meluaskan jangkauan dakwahnya hingga ke masyarakat umum dari daerah-daerah perkotaan dan kemudian berkembang ke masyarakat pedesaan.

Kenaikan jumlah simpatisan PKS yang berlipat-lipat sebagaimana tersebut di atas, bisa dihubungkan dengan meningkatnya kepercayaan rakyat kepada PKS

akibat citra yang dibangun partai ini sebagai partai yang bersih dari KKN, merakyat, mau memperjuangkan rakyat kecil, peduli pada masyarakat yang tertimpa bencana, dan memiliki akhlak yang baik dalam aksi-aksi massa maupun penampilan di depan publik lainnya. Selain itu, keberhasilan ini juga berhubungan dengan perubahan strategi mengurangi citra radikalnya dan mengkampanyekan diri sebagai partai yang moderat, terbuka, inklusif, dan bersahabat dengan kelompok dan bahkan agama lain.

Struktur kepengurusan ini mula-mula dikembangkan dari basis dakwah Tarbiyah yang telah ada, baik melalui LDK, Rohis, pengajian di kantor-kantor maupun lewat pesantren. Selain itu, pengembangan ke daerah-daerah baru juga dilakukan melalui sistem pengkaderan PKS yang dilaksanakan secara terus-menerus oleh pengurus daerah lain yang sudah eksis.

Pengembangan jaringan kepengurusan PKS didukung oleh piranti kultural pengajian Tarbiyah dengan sistem stelsel yang dilakukan secara swadaya oleh para dai Tarbiyah, dan juga oleh piranti institusional, yakni sistem pengkaderan resmi yang dilakukan dan didanai oleh para pengurus PKS.

Dengan dua basis pengembangan tersebut, PKS berhasil memiliki perwakilan di seluruh propinsi di

Indonesia. Artinya, PKS telah berhasil mengembangkan dakwahnya hingga ke propinsi-propinsi yang mayoritas penduduknya non muslim, seperti Bali, Sulawesi Utara, NTT, Irian Jaya Barat, dan Papua. Sedangkan Dewan Pimpinan Cabang yang berkedudukan di kecamatan telah mencapai 65% dari keseluruhan kecamatan yang berjumlah 1009 DPC.⁵⁷

Sebagaimana basis massa awal PK (Jama'ah Tarbiyah) yang berkembang pesat di kota-kota melalui kampus, PKS adalah juga partai "orang kota". Para kader PKS pada umumnya adalah mereka yang berpendidikan tinggi, pegawai kantoran, dan berkultur Islam modernis. Jadi, konstituen PKS memiliki kesamaan dengan Muhammadiyah dari sisi kultur keagamaan dan sama dengan kultur pendukung PAN sehingga tidak mengherankan jika anggota Muhammadiyah dan konstituen PAN adalah kelompok yang sangat potensial direbut oleh PKS.

DKI Jakarta, sebagai ibu kota negara, telah dimenangi oleh PKS dengan perolehan 23 persen suara. Ini merupakan prestasi tersendiri bagi PKS karena telah memenangi pemilu di tingkat propinsi dan ibu kota negara. Selain itu, PKS juga menang di beberapa kabupaten dan kota. Di Depok, partai ini menang dengan 27,5 persen. Di

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 72.

Banda Aceh menang dengan 27 persen. Disusul kemenangan di Bekasi dengan 21 persen. Kota Bandung menang dengan 20,5 persen. Sedangkan di Halmahera Selatan, PKS meraih 20 persen, di Medan meraih 16,7 persen, Kota Batam meraih 14 persen, dan Kota Padang meraih 12 persen.⁵⁸

Semenjak masih menjadi Jama'ah Tarbiyah, PKS telah membangun modal kultural dan modal sosial yang cukup tertata. PKS telah menata jaringan dalam satuan-satuan kecil (*usroh*) yang saling membina keimanan, ketaqwaan, ilmu keislaman, akhlaq, dan perilaku keseharian di kalangan anggotanya. Para kader tersebut juga menciptakan kultur keislaman yang khas di lingkungan masing-masing, baik dalam keluarga, jama'ah, maupun lingkungan kerja. Dengan modal kultural ini, PKS bisa mengembangkan dan mempertahankan ideologi, *manhaj*, pemikiran, nilai-nilai yang dianut, serta menjadi sarana anggota dan rekrutmen kader baru.

PKS melalui jaringan kader Tarbiyahnya juga membentuk lembaga-lembaga dakwah memberikan sumbangan tidak kecil bagi keberhasilan partai ini. Lembaga-lembaga yang mereka dirikan, antara lain lembaga bimbingan belajar “Nurul Fikri”, lembaga dakwah Khoiru Ummah”, lembaga pendidikan “Al Hikmah”,

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 84.

lembaga pengkajian “Sidik”, kelompok-kelompok kesenian “Nasyid”, majalah “Sabili” dan berbagai penerbit buku, antara lain: Al-Ishlahy Press, Gema Insani Press, Pustaka Al-Kautsar, Robbani Press I’tishom, Era Intermedia, dan Asy-Syamil. Di berbagai daerah, PKS juga telah membentuk lembaga-lembaga serupa dan ditambah dengan majelis taklim, lembaga pendidikan Islam, hingga pesantren.

Sebagai partai politik, PKS selain memiliki DPD dan DPC serta DPR, ia juga mengembangkan lembaga-lembaga pelayanan, dakwah dan pengembangan kader. PKS cukup berhasil mengembangkan *social capital* berbentuk lembaga maupun organisasi-organisasi “masyarakat madani” yang cukup solid. Inilah ujung tombak PKS untuk mendekatkan diri dengan konstituen. Hal ini dilakukan dengan dua jalur: pembinaan teknis fungsional oleh bidang-bidang terkait dan pembinaan manajemen oleh Departemen Pembinaan Organisasi di bawah Bidang Perencanaan dan Pengembangan SDM.

Dalam bidang pelayanan umat, Bendahara Umum melakukan pembinaan dan koordinasi fungsional dengan lembaga-lembaga sosial kemanusiaan, seperti Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU), Dompot Sosial Ummul Quro (DSUQ), dan Bulan Sabit Merah Indonesia (BSMI). Bidang kewanitaannya membawahi organisasi seperti Salimah dan Pos

Wanita Keadilan. Bidang pemberdayaan ekonomi membina dan menangani Serikat Pekerja Keadilan (SPK) sejak 1998, Koperasi Syari'ah Indonesia (KOSINDO) yang berdiri pada tahun yang sama. Sejak tahun 2000, KOSINDC) membina Jaringan Pengusaha Muslim Indonesia UPMI), Indonesian Labour Foundation (ILF), dan sejak tahun 2003 mendirikan dan- membina Perhimpunan Petani Nelayan Sejahtera Indonesia (PPNSI).⁵⁹

PKS juga mendirikan lembaga kajian strategis, seperti CIR, ICTECS, PAHAM, INFES, dan CYFIS. Lembaga-lembaga ini dibina oleh bidang Kebijakan Publik. Bidang pembinaan SDM membina Masyarakat Ilmuwan dan Teknologi Indonesia. (MITI) sejak 2004, jaringan Sekolah Terpadu (JST) sejak 2003, dan Islamic Medical Association and Network Indonesia (IMANI) sejak 2002.⁶⁰

Sebagaimana partai lain, PKS juga memiliki organisasi underbow seperti Garda Keadilan (GK), Kesatuan Aksi Pelajar Muslim Indonesia (KAPMI), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), dan Yayasan Pemuda dan Pelajar Asia Pasifik (YPPAP). Ormas pemuda ini dibina oleh Departemen kepeloporan Pemuda. Bersama Departemen Kaderisasi, Departemen

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 91-92.

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 92.

Kepeloporan Pemuda juga membina Gugus Tugas Dakwah Sekolah (GTDS).⁶¹

Dengan perolehan suara yang cukup besar pada Pemilu 2004 serta pengaruh politiknya yang meningkat dari hari-ke hari, PKS berhasil mendudukkan wakil-wakil mereka pada jabatan-jabatan publik, baik di birokrasi, legislatif BUMN, maupun lembaga perguruan tinggi dan lembaga keulamaan, semisal MUI. PKS juga kian mewarnai organisasi-organisasi profesi, seperti asosiasi dokter, hakim, advokat, arsitek, dan pengusaha dengan mendudukkan kadernya pada jajaran kepengurusan.

Di legislatif, PKS juga berhasil mendudukkan wakilnya sebanyak 45 orang di DPR pusat, 157 borang di DPRD propinsi, dan 900 orang di DPRD Kabupaten/ Kota. Di lembaga wakil rakyat ini, kader-kader PKS mampu bersaing dalam merebut jabatan-jabatan strategis, seperti pimpinan dewan, fraksi, serta komisi. Adapun yang sangat *monumental* adalah terpilihnya mantan presiden PKS, Hidayat Nur Wahid sebagai ketua MPR. dengan 326 suara, mengalahkan Sutjipto dari PDIP dengan 324 suara.

PKS juga mengirimkan wakil-wakilnya pada jabatan-jabatan menteri dan mendorong kader-kader mereka menduduki jabatan-jabatan strategis (eselon atas) di berbagai departemen, BUMN, maupun pemerintahan pusat

⁶¹ *Ibid.*

serta daerah. PKS juga mengusung kadernya menjadi pemimpin daerah, baik sebagai kepala daerah maupun wakil kepala daerah. Di beberapa kota besar, calon kepala daerah yang diusung PKS menjadi Calon yang sangat diperhitungkan. Sebagian lagi menjadi runner up.

Prestasi politik PKS yang monumental pada masa-masa awal adalah kemenangan Nur Mahmudi Ismail menjadi walikota Depok. Kemenangan ini disusul dengan Pilkada di Banda Aceh dan Kota Bekasi. Selain itu, suara PKS yang sangat signifikan pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Banten juga menjadi pertanda bahwa jaringan kader, simpatisan, dan struktur partai ini mengalami kemajuan yang berarti. Selain itu, capaian suara PKS dalam Pilkada DKI yang mengusung Adang Darajatun-Dani Anwar sebagai Cagub-Cawagub juga mengesankan. Pasangan yang diusung sendirian oleh PKS ini mendulang 1,5 juta suara. Padahal, pasangan ini berhadapan dengan Fauzi Bowo yang diusung secara beramai-ramai oleh “koalisi pelangi” partai-partai. Kemenangan lain yang semakin meyakinkan publik bahwa PRS memiliki gigi politik yang tajam adalah kemenangan pasangan Ahmad Heryawan (PKS) dan Dede Yusuf (PAN) dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat 2008. PKS juga meraih kemenangan pemilihan gubernur di Sumatera Utara.

Prestasi politik yang diraih PKS, serta grafik meningkat dari perkembangan partai kalangan Tarbiyah ini memunculkan optimisme di kalangan internal serta melahirkan analisis bahwa PKS akan berkembang menjadi partai besar. Modal SDM keluaran Tarbiyah, dan juga modal sosial-kultural serta infrastruktur organisasi yang kuat akan menjadi modal politik yang sangat penting bagi PKS untuk menjadi kekuatan politik dominan.⁶²

C. Kader-Kader Fenomenal PKS

a. Ketua lembaga Negara:

1. Hidayat Nur Wahid: -Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat: 2004-2009,
-Ketua Fraksi Keadilan Sejahtera di DPR: 2009-kini.
2. Anis Matta: - Wakil Ketua DPR: 2009 - 2013.
3. Sohibul Iman: - Wakil Ketua DPR: 2013 - kini.

b. Menteri Kabinet Persatuan Nasional:

- Nur Mahmudi Ismail: -Menteri Kehutanan: 1999 - 2000,
-Wali Kota Depok: 2005 - 2010, 2010 - kini.

c. Kabinet Indonesia Bersatu:

⁶² Analisis yang sangat optimistik dari kalangan internal PKS dicontohkan oleh Djony Edward dalam Djony Edward, *Efek Bola Salju Partai Keadilan Sejahtera*, (Bandung: Harakatuna Publishing, 2006). Penulis yang berlatar belakang Tarbiyah ini mengatakan bahwa PKS akan menggeser peran politik Golkar dan PDIP paling cepat pada 2009 dan paling lambat pada 2014.

1. Anton Aprianono: -Menteri Pertanian: 2004 - 2009.
2. Adhyaksa Dault: -Menteri Pemuda dan Olahraga:
2004 - 2009.

d. Kabinet Indonesia Bersatu II:

1. Tifatul Sembiring: -Menteri Komunikasi dan Informatika: 2009 - kini.
2. Salim Segaf Al-Jufri: -Menteri Sosial: 2009 - kini.
3. Suswono: -Menteri Pertanian: 2009 - kini.
4. Suharna Surapranata: -Menteri Riset dan Teknologi: 2009 - 2011.

e. Kepala daerah:

1. Ahmad Heryawan: -Gubernur Jawa Barat: 2008 - 2013, 2013 - kini.
2. Gatot Pujo Nugroho: -Gubernur Sumatera Utara: 2011 - 2013, 2013 - kini.
3. Irwan Prayitno: -Gubernur Sumatera Barat: 2010 - kini.

f. Presiden PKS

No	Foto	Nama	Dari	Sampai	Keter
----	------	------	------	--------	-------

1.		Nurmahmudi Isma'il	1998	2000	Ditunjuk Kehutan Persatuan Presiden 2000
2.		Hidayat Nur Wahid	2000	2005	Terpilih MPR:20
3.		Tifatul Sembiring	2005	2009	Ditunjuk Komuni Informa Indones Presiden

4.		Luthfi Hasan Ishaq	2009	2013	Pejabat presiden mundur karena suap impor dan
5.		Anis Matta	2013	Petahanan	Wakil Ketua L 2013

BAB 3

Analisis Ideologis dan Aksi Kolektif PKS

A. Orientasi Ideologi Islamisme

Untuk lebih memahami hakikat ideologi, pemikiran keagamaan, corak pandangan keindonesiaan, dan pengaruh Ikhwanul Muslimin dalam PKS sebagaimana telah dibahas pada bab sebelumnya, perlu kiranya kita mengkaji lebih mendalam mengenai model pengkaderan PKS. Majelis-majelis yang disebut Tarbiyah dan forum-forum pengkaderan partai telah menjadi medan pembentukan ideologi, pemahaman keislaman, dan pandangan politik tentang kebangsaan. Dalam pengkaderan ini pula pemikiran-pemikiran Ikhwanul Muslimin (IM) ditransmisikan kepada kader-kadernya.

Teori kesempatan politik (*political opportunity structure*), dipakai untuk menjelaskan faktor-faktor internasional dan domestik yang membuahi dan membidani kelahiran PKS. Teori pengerahan sumber daya (*resources mobilization*) menerangkan evolusi PKS sejak zaman Jama'ah Tarbiyah sampai zaman 'kegalauan partai terbuka'. Sedangkan teori pemingkanaan aksi kolektif (*collective action framing*) untuk mengulas ideologi / pandangan kader partai yang *militant*.

PKS adalah partai sekaligus pergerakan, “partai tidak biasa” yang sempat menjadi primadona ini suka atau tidak suka harus mampu bersilat dalam ketegangan jurus kepartaian dan kepergerakan, Kedua “sayap” tersebut tidak boleh patah, tapi harus dikelola dengan bijaksana.⁶³ Kubu *hizb* (partai) harus memerhatikan gejolak batin kelompok *harakah* (gerakan), karena *hizb* pada hakikatnya perpanjangan dari *harakah*. Pergerakan adalah partai dan partai adalah pergerakan (*al-harakah hiya al-hizb wa al-hizb huwa al-harakah*).

Untuk mengkaji partai dan pergerakan yang percaya akan karakter Islam yang integral (*kamil*) dan meliputi semua (*syamil*), kombinasi teori-teori ilmu sosial (pendekatan integratif) mungkin memang perlu. politik bagian dari ibadah, agama, dan negara. Dalam konteks ini, menurut M. Natsir; “Dakwah itu tidak lebih rendah daripada politik.

Aksi-aksi kolektif PKS, menunjukkan adanya *gap* yang menganga antara kehendak menjadi terbuka dan perlunya memelihara perasaan kader inti mereka. Lewat analisis peristiwa protes (*protest-even analysis*), fakta bicara bahwa 6 dari 10 peristiwa kolektif PKS dari tahun 1998-2007, tak ada sangkut pautnya dengan isu domestik

⁶³ Novriantoni Kahar: “Utopia dan Kegagalan Partai Islamis”, *Majalah Tempo* edisi 26 Maret – 01 April 2012

yang bersifat non-Islamis. 62,2 % aksi massa PKS didominasi isu-isu Islamis seperti anti-Amerika, anti-Zionisme, dan pembelaan terhadap Palestina sebagai bagian dari *global ummah*.

Di satu sisi, PKS ingin membangun citra sebagai partai terbuka dan *friendly* terhadap Amerika. Namun di lain sisi, Amerika bersama Israel terlanjur dituding sebagai penyebab kekacauan dunia. Dan itu tertuang dalam konstruksi ideologi yang mengaduk-aduk batin kader-kadernya. Demi upaya Islamisasi ganda (kultural dan struktural) terhadap masyarakat Indonesia, partai dakwah ini punya empat orbit dakwah (*mahawir*). Orbit pengorganisasian atau pengkaderan (*mihwar tandzimi*), orbit sosial-kemasyarakatan (*mihwar sya'bi*), orbit kelembagaan pemerintah dan non-pemerintah (*mihwar muassasati*); semua dilakukan bertahap (*tadaruj*) dan simultan. Hanya orbit negara (*mihwar daulah*) yang bertujuan meraih kekuasaan secara demokratis dan menegakkan syariah secara kaffah yang kiranya masih belum benar-benar terlaksana.

. Bingkai transnasional Islamisme berupa imaji tentang Islam yang dikepung Barat, dikurung konspirasi Zionis, dihalang-halangi menjadi *global ummah*, terasa primitif untuk masa yang tak akan lama. Kepercayaan bahwa Islam dan syariah adalah solusi bangsa, akan terus

diuji dalam sebuah masyarakat terbuka. Pelan-pelan, slogan-slogan tipikal Islamis ini akan berbenturan dengan fakta bahwa negara yang tak bersyariah dan tidak pula menjadikan agama sebagai solusi utama, di Barat sana, justru tetap adil dan sejahtera.

Problem terbesar Islamisme era demokrasi,” kata Bruce K. Rutherford (2008), “adalah imannya yang terlalu besar pada negara yang mereka gugat di masa otoriternya”. Begitu memasuki era demokrasi dan berpartisipasi dalam memerintah, mereka kembali memberi kewenangan yang invasif kepada negara, terutama demi pembatasan kebebasan sipil. Kepercayaan bahwa negara adalah dan dan seharusnya berfungsi sebagai “agen moral” demi mewujudkan masyarakat saleh dan salehah, adalah utopia Islamisme yang cenderung klise di mana-mana.

PKS bukanlah partai yang statis dan berhenti berdialektika. Dinamika internal, proses belajar berkesinambungan (*continues change*), dan ijtihad politik yang terus terbuka, mungkin akan menjadi kekuatan mereka yang utama. Sebagai partai kader, PKS memiliki sistem kaderisasi kepartaian yang sistematis dan metodik. Kaderisasi ini memiliki fungsi rekrutmen calon anggota dan fungsi pembinaan untuk seluruh anggota, kader, dan fungsionaris partai. Fungsi-fungsi ini dijalankan secara terbuka melalui infra struktur kelembagaan partai yang

tersebar dari tingkat pusat hingga tingkat ranting. Fungsionalisasi berjalan sepanjang waktu selaras dengan tujuan dan sasaran umum partai? khususnya dalam bidang penyiapan sumber daya manusia dalam partai.⁶⁴

Pembinaan kader bagi PKS merupakan hal yang mendasar sebab pembinaan pribadi merupakan langkah awal bagi pembinaan keluarga, masyarakat, dan bahkan negara. Dalam pandangan PKS, Islamisasi negara hanya bisa diwujudkan apabila terdapat pribadi-pribadi yang saleh, yang akan membentuk keluarga yang Islami. Selanjutnya, keluarga-keluarga itulah yang akan membentuk masyarakat yang Islami. Individu merupakan alat masyarakat dan negara yang terpenting dalam melaksanakan tugas sosial politik demi membangun negara yang Islami.⁶⁵

Secara umum, pengkaderan di kalangan PKS terdiri dari tiga jenis, yakni Tarbiyah, pengkaderan oleh *underbow* PKS, dan pengkaderan formal kepartaian. Tiga jenis pengkaderan ini merupakan satu kesatuan yang saling menopang dan bahkan sering kali bertemu dalam satu

⁶⁴ Aay Muhammad Furqon, Partai Keadilan Sejahtera: Ideologi dan Praksis Politik Kaum Muda Muslim Indonesia Kontemporer, (Jakarta: Teraju, 2004), hlm. 209.

⁶⁵ Ibid., hlm. 208.

bentuk dan satu iven yang sama sehingga tiga lapis pengkaderan ini acap kali terlihat tumpang-tindih.

Tarbiyah yang berintikan pembinaan berbasis kelompok kecil (usroh/halaqoh) di bawah seorang *murabbi* lebih sering dilakukan sebagai kegiatan non-formal partai dan dijalankan oleh para kader PKS melalui jaringan Tarbiyah yang pada umumnya berbasis di kampus. Akan tetapi, seiring berkembangnya dakwah ke masyarakat, pembinaan seperti ini juga berjalan di kalangan masyarakat umum, khususnya kaum ibu-ibu PKS melalui Salimah dan Pos Wanita Keadilan (PWK).

Organisasi-organisasi underbow PKS, seperti Garda Keadilan (GK), Salimah, Serikat Pekerja Keadilan (SPK), Perhimpunan Petani Nelayan Sejahtera Indonesia (PPNSI), Kesatuan Aksi Pelajar Muslim Indonesia (KAPMI), dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) mengembangkan pola dan model pengkaderan sendiri-sendiri. Kelompok-kelompok yang secara formal bukan underbow PKS namun berafiliasi secara ideologis ke partai ini, seperti ROI-IIS dan LDK juga mengembangkan pola pembinaan dan pengkaderan yang khas. Sebagai misal, di KAMMI ada yang disebut Daurah Marhalah I, II, dan III; di ROHIS dikenal pengkaderan yang dinamai Latihan Dasar

Kepemimpinan, sementara di LDK ada pembinaan bernama Kajian Rutin.⁶⁶

Sedangkan pengkaderan formal partai dilakukan secara resmi oleh kepengurusan partai dari Dewan Pengurus Ranting (DPRa) hingga Dewan Pengurus Pusat (DPP). Pengkaderan formal PKS sebagai organisasi induk ini terdiri dari tujuh jenjang, yakni: TOP I (Training Orientasi Partai Satu), TOP II; TD I (Training Dasar Satu), TD II; TL I (Training Lanjutan Satu), TL II, dan Training Manajemen dan Kepemimpinan Sosial (TMKS). Pengkaderan formal ini merupakan sarana pembinaan kader sekaligus penjenjangan bagi mereka yang akan berimplikasi pada distribusi peran dan posisi struktural di PKS.

Di tengah berbagai jenis aktivitas pengkaderan di kalangan PKS ini, pengkaderan Tarbiyah yang saat ini lebih dikenal sebagai kegiatan *liqo* (pertemuan) dan mentoring-pada kenyataannya masih menduduki posisi kunci bagi pengkaderan PKS. PKS dan organisasi underbownya tetap menjadikan Tarbiyah sebagai sarana pengkaderan yang utama. Hal ini bisa dimengerti karena tulang punggung PKS yang sesungguhnya hingga saat ini adalah jaringan Tarbiyah. Struktur kepartaian formal belum berhasil menggantikan basis informal Tarbiyah yang telah dibangun

⁶⁶ Imdadun Rahmat; Ideologi PKS' Wawancara dengan Kokom Komariah, (3 Januari 2008).

hampir tiga dekade itu. Sistem pembinaan yang intensif dalam halaqoh Tarbiyah yang dilakukan sekali sepekan dan disertai mentoring atas *mutarabbi* (anak didik) oleh *murabbi* (pendidik) ini memiliki keunggulan tersendiri. Dalam bab ini kita akan menelaah lebih dalam mengenai sistem pendidikan, kurikulum (mencakup filosofi, materi, dan metode pembelajaran), dan sarana-sarana yang dipergunakan dalam Tarbiyah, serta jenjang-jenjang pengkaderan di PKS.

Sebagaimana telah dikemukakan dalam bab terdahulu, sistem pendidikan Tarbiyah di kampus-kampus yang dilakukan oleh PK/PKS ini dilestarikan, diatur, diformalkan, dan distandarkan. Untuk itu, DPP PKS telah memproduksi modul panduan yang menjadi acuan resmi pengkaderan di partai ini. Pada 2003, PKS menerbitkan sebuah modul berjudul “Manajemen Tarbiyah Anggota Pemula”.⁶⁷ Kemudian, pada 2005 terbit modul yang lebih lengkap yang tidak saja diperuntukkan bagi anggota pemula, tetapi juga untuk anggota muda, anggota madya, dan anggota dewasa. Modul tersebut berjudul *Manhaj Tarbiyah PK Sejahtera*.⁶⁸

⁶⁷ Tim Depanemen Kaderisasi DPP PK Sejahtera, *Manajemen Tarbiyah Anggota Pemula*, Gakarta: Departemen Kaderisasi DPP PK Sejahtera, 2003).

⁶⁸ *Manhaj Tarbiyah PK-Sejahtera*, (Solo: Media Insani Press, 2005).

Modul yang disebut pertama memuat pedoman pendidikan dasar bagi para kader PKS. Dari pengkaderan yang mengacu pada buku inilah ideologi, pemikiran, sikap, dan perilaku mendasar kader-kader PKS terbentuk. Sedangkan modul kedua, selain memuat modul bagi anggota pemula, juga merupakan kurikulum yang mematangkan ideologi kader PKS. Di dalamnya juga memuat perluasan Wawasan keislaman, *manhaj* dakwah, *skill* manajemen organisasi, Serta Wawasan politik kader PKS.

Untuk mempermudah penerapan modul panduan ini, para aktivis Tarbiyah menyusun buku-buku pendukung yang menjelaskan materi dan kandungan dari modul tersebut.⁶⁹ Buku-buku para tokoh IM yang menjadi rujukan modul Tarbiyah ini juga diterbitkan secara meluas oleh para kader PKS, khususnya buku-buku tentang pemikiran Hasan al-Banna dan Yusuf al-Qaradhawi. Selain itu, buku-buku yang memuat cara-cara pengelolaan Tarbiyah agar bisa dilakukan dengan baik dan efektif juga banyak ditulis para aktivis PKS.⁷⁰

⁶⁹ Salah satu buku yang akhir-akhir ini luas dipakai kalangan Tarbiyah adalah "Syarah Rasmul Bayan Tarbiyah", yang ditulis oleh Jasiman, Lc., salah seorang aktivis senior Tarbiyah. Lihat Jasiman Lc., *Syarah Rasmul Bayan Tarbiyah*, (Solo: Aulia Press, 2005).

⁷⁰ Buku-buku tersebut, antara lain: Satria Hadi Lubis, *Menjadi Murobbi Sukses: Panduan untuk Para Pembina, Mentor,*

Sistem pengkaderan Tarbiyah di kampus-kampus merupakan kerangka dasar dan fundamen utama pengkaderan PKS. Materi-materi *manhaj* Tarbiyah ini pula yang menjadi acuan berbagai ragam pengkaderan di PKS maupun underbow-underbow-nya. Hingga kini, persentase terbesar dari kegiatan Tarbiyah PKS juga berada di kampus-kampus. Apa yang dipakai di PKS merupakan instrusionalisasi dalam kerangka sistem dan struktur partai terhadap man/mj dan sistem pengkaderan Tarbiyah.

Dalam rangka mengembangkan kemampuan kader, PKS kemudian menambahkan dan mengembangkan sistem Tarbiyah pada tingkat selanjutnya yang dikemas dalam sistem Tarbiyah bagi anggota muda, anggota madya, dan anggota dewasa.⁷¹ Tingkat-tingkat Tarbiyah ini menggambarkan upaya sistematis untuk memperluas dan memperdalam sisi ideologis, kesalehan, Wawasan, dan pengetahuan Islam, aspek manajemen dan kepemimpinan, serta penguasaan wawasan sosial politik, dan ekonomi.

Naqib, dan Mereka yang ingin Berhasil Memimpin Kelompok Kecil, (Jakarta: Kreasi Cerdas utama, 2002) dan Satria Hadi Lubis, Buku Pintar Mengelola Halaqoh: Solusi Praktis Mengelola Pengajian Kelompok, Ta'lim, Usroh, dan Mentoring, (Tangerang: FBA Press, 2006).

⁷¹ Sistem ini terbakukan dalam Manhaj Tarbiyah PK-Sejahtera, (Solo: Media Insani Press, 2005)

Selain itu, PKS juga memproduksi wahana rekrutmen dan juga wahana pengkaderannya yang disesuaikan dengan jenjang kader partai serta kebutuhan mereka dari jenjang yang paling rendah, Training Orientasi Partai (TOP), hingga yang tertinggi, Training Manajemen dan Kepemimpinan Sosial (TMKS). Akan tetapi, struktur dan sistem utamanya masih tetap mengacu pada apa yang dipakai di Tarbiyah di kampus-kampus. Perekrutan dan pengkaderan yang dilakukan struktur partai dari pusat hingga ranting merupakan pintu masuk ke arah pengkaderan utama dalam sistem pengkaderan Tarbiyah yang sudah dikembangkan.

B. “Hidden Agenda: Aksi Kolektif Islamisme”

Sebagai partai politik, PKS memiliki tujuan yang hampir sama dengan partai lain, yakni mewujudkan demokratisasi, memperjuangkan kejayaan negara, membela kepentingan rakyat, menegakkan keadilan, meningkatkan kesejahteraan, memperbaiki birokrasi, dan yang penting mewujudkan agenda-agenda reformasi. Akan tetapi sebagai partai dakwah, PKS juga memiliki hidden agenda (agenda tersembunyi: Islamisme) yang berbeda dengan agenda partai lain, lebih-lebih partai yang berideologi kebangsaan. PKS secara intensif melakukan pendidikan kader dalam bingkai Tarbiyah, berdakwah di

masyarakat untuk kembali kepada Islam dan menolak sekularisme serta bergerak melawan hegemoni Barat.

PKS telah lama dikaitkan dengan Ikhwanul Muslimin yang berbasis di **Mesir**, disebabkan beberapa pendirinya bersekolah di sekolah-sekolah Ikhwan^[16] Beberapa indikasi yang terlihat adalah saat Mardani Ali Sera, juru bicara PKS, membenarkan bahwa beberapa karya pendiri Ikhwanul Muslimin; **Hasan al-Banna**, menjadi bacaan dan juga rujukan dalam proses pengkaderan partai.^[17] PKS juga diklaim ikut serta dalam Revolusi Mesir 2011, meskipun kabar tersebut kemudian dibantah dan menegaskan bahwa para kader partai (yang diberitakan sebanyak 600 orang, sebagian besar berstatus mahasiswa) di Mesir hanya berperan menyalurkan logistik kepada warga negara Indonesia yang terjebak di Mesir.^[18] Namun, PKS menyatakan "berduka" atas penggulingan presiden Mesir dari Ikhwanul Muslimin, Muhammad Mursi pada Juli 2013, sekaligus menyerukan kepada pemerintah Indonesia untuk menekan militer Mesir.^[19]

Keterkaitan PKS dan Ikhwanul Muslimin juga dibenarkan oleh Yusuf al-Qaradawi, salah satu tokoh Ikhwan yang berpengaruh,^[20] dan juga oleh pendiri PK, Yusuf Supendi, yang mengakui bahwa 90% pendanaan PK untuk pemilihan umum pada 1999 didanai oleh partai-partai seideologi di Timur Tengah.^[21] Namun, Ketua Dewan

Syariah PKS, Surahman Hidayat, menegaskan bahwa mereka hanya mempunyai "hubungan cita-cita" dengan Ikhwanul Muslimin dan menolak klaim bahwa PKS adalah perwujudan lain dari organisasi tersebut. Surahman justru menyatakan bahwa PKS secara substantif adalah pelanjut perjuangan Masyumi.^[22]

PKS juga disebut mempunyai kemiripan dengan Partai Keadilan dan Pembangunan pimpinan Abdullah Gül yang berkuasa di **Turki**. Surahman Hidayat juga membenarkan bahwa mereka juga sering mengunjungi kader AKP di Turki "untuk perbandingan".^[23] Kedekatan ini juga diperkuat dengan banyaknya seminar dan silaturahmi antara PKS dan AKP, salah satunya seperti saat para petinggi AKP berkunjung ke Jakarta pada Februari 2012.^[24] PKS juga menggelar pertemuan kader sedunia di Istanbul pada April 2013. Meskipun presiden Anis Matta menyatakan bahwa pemilihan Istanbul adalah karena posisi strategik kota tersebut di tengah-tengah Asia, Eropa dan Afrika, Anis juga menjadwalkan pertemuan dengan petinggi AKP dan mengharapkan agar kader-kader dapat belajar dari kesuksesan AKP di Turki.^[25]

PKS juga dikenal sebagai salah satu partai yang paling vokal memperjuangkan kemerdekaan Palestina.^[26] Beberapa aksi PKS untuk kemerdekaan Palestina antara lain dengan menempuh jalur demonstrasi, seperti yang

dilakukan pada Maret 2010 di kompleks Monas.^[27] Tak jarang pula PKS mengecam negara yang tidak mendukung upaya kemerdekaan Palestina, seperti pada November 2012, saat Amerika Serikat tidak menyetujui masuknya Palestina sebagai negara pemantau di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa.^[28] Demonstrasi PKS dikenal dengan mengorganisir puluhan ribu kader dan tak jarang pula umat non-Muslim ikut di dalamnya, seperti politisi PDI Perjuangan, Sabam Sirait, yang ikut berdemonstrasi bersama massa PKS pada Maret 2010.^[29] Selain itu, PKS juga memanfaatkan massa kadernya yang besar untuk menggalang dana dalam jumlah yang besar, dan seringkali sumbangan tersebut disampaikan langsung lewat utusan khusus PKS ke Palestina, seperti saat penggalangan dana serentak seluruh DPW PKS di Indonesia pada bulan November 2012.^{[30][31]}

Dalam pengamatan Wilfred Cantwell. Smith, sebagaimana dikutip oleh an- Na'im, tema semua gerakan Islam di hampir seluruh belahan dunia berkisar pada dua hal: protes melawan kemerosotan internal dan “serangan eksternal”. Para pengamat muslim kontemporer melihat fenomena ini sebagai respons muslim terhadap sekularisme Barat dan dominasi atas dunia Islam, di samping respons

terhadap krisis kepemimpinan di kalangan umat Islam sendiri.⁷²

Hal ini sejalan dengan analisis Akbar S. Ahmed yang mengatakan bahwa sambutan yang luas terhadap gerakan-gerakan yang sifatnya radikal ini sesungguhnya disebabkan oleh faktor perlawanan terhadap Barat yang hegemonik dan keterlibatan Barat yang terlalu dalam terhadap negara-negara Islam, seperti yang terjadi di Irak, Libya, Bosnia,⁷³ dan Palestina. Umat Islam sudah lama diperlakukan tidak adil oleh Barat secara politik, ekonomi, dan budaya sehingga mereka harus mendeklarasikan perlawanannya terhadap Barat. Dominasi Barat terhadap negara-negara Islam tidak dalam kapasitasnya yang saling bekerja sama, tetapi malah memojokkan dan memusuhi. Pada gilirannya, ketidakadilan Barat dilawan dengan aksi-aksi kekerasan seperti yang terjadi di Palestina dan Libya.

Dalam kerangka strategis-politis, agenda-agenda Islamis PKS ini cenderung tidak ditampilkan secara menonjol di depan publik awam. Ini hanya muncul dalam

⁷² Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Dekonstruksi Syariah*, cet. III, (Yogyakarta: LKiS, 2001), hlm.9.

⁷³ Konflik di Bosnia, Palestina dan Afghanistan telah mempertajam polarisasi dan radikalisi masyarakat muslim dunia. Lihat Akbar S. Ahmed dan Hastings Donnan (eds.), *Islam, Globalization, and Postmodernity*, (London: Routledge, 1994), hlm.8.

Wilayah terbatas di kalangan kader. Paling jauh, agenda–agenda ini ditampilkan secara selektif di kalangan simpatisan dan kolega gerakan. Oleh karena itu, PKS tetap dicitrakan sebagai partai yang bukan ancaman dan tetap mentaati ketentuan konstitusional.

Dilihat dari aktivitasnya selama menjadi PK dan PKS, partai ini memiliki agenda dakwah, antara lain:

1. Menegakkan Syari’at Islam

Bagi PKS, tegaknya syariat Islam merupakan semangat yang melandasi ekstensinya, koridor yang menjadi acuan gerakannya, serta tujuan dari perjuangannya. Cita-cita PKS menggariskan bahwa syari’at Islam harus menjadi sendi kehidupan, baik dalam ranah kemasyarakatan maupun kenegaraan. Dalam hal ini, PKS menempuh dua strategi sekaligus:

Pertama strategi dakwah kultural, yakni membangun pribadi-pribadi muslim yang baik, keluarga-keluarga muslim yang baik, dan masyarakat muslim yang ideal. Dakwah PKS dalam ranah ini ditempuh melalui berbagai sarana, baik melalui sistem pembinaan kader, maupun dakwah di masyarakat luas. Sistem pembinaan kader dilakukan melalui Tarbiyah dengan segenap bentuk dan penjenjangannya. Sedangkan dakwah di masyarakat luas ditempuh

dengan pendidikan formal, pendidikan di pesantren, ta'lim, pengajian, dan penerbitan buku.

Kedua, strategi dakwah struktural, yakni berupaya melakukan perubahan terhadap tata aturan perundang-undangan ke arah yang lebih Islami. Dengan keikutsertaan PKS dalam institusi legislatif di berbagai tingkatan, partai ini memperjuangkan regulasi-regulasi yang sesuai dengan Islam atau setidaknya menguntungkan dakwah Islam. Salah satu kebijakan umum PKS dalam bidang pengembangan hukum adalah penerapan syari'at Islam dalam hukum publik. Terkait dengan hal di atas, PKS memiliki beberapa agenda hukum, antara lain:

- a. Mendukung terwujudnya supremasi hukum di dalam kehidupan masyarakat.
- b. Membangun kesiapan masyarakat untuk secara bertahap menerima syari'at Islam melalui Cara-Cara syar'i dan konstitusional.
- c. Memperjuangkan secara struktural pemberlakuan hukum-hukum Islam yang masyarakat telah siap menerimanya.
- d. mempraktikkan ajaran Islam dan syari'atnya secara istiqamah sebagai solusi, keteladanan, dan rahmat bagi kehidupan⁷⁴

⁷⁴ "Kebijakan Dasar PKS", dalam *PKS on Line*.

2. Menegakkan sistem pemerintahan Islam dengan berbagai atributnya

Sebagaimana gerakan Islamis lainnya, PKS juga menetapkan berdirinya sebuah negara Islam dan bahkan jika mungkin menegakkan Khilafah Islamiyah sebagai cita-cita perjuangan, atau paling tidak sebagai sebuah bentuk yang diidealkan. Berdirinya sebuah negara Islam dan kekhilafahan Islam menurut kalangan PKS merupakan kewajiban yang tidak bisa diingkari. Dalam konstruk ini, negara Islam dipahami tidak saja pada substansi, tetapi juga bentuk, simbol-simbol, dan atributnya.

Perjuangan untuk mewujudkan agenda ini memang masih terbatas pada ranah sosialisasi melalui pengkaderan dan dakwah. Agenda ini tidak masuk dalam prioritas agenda politik PKS. Pendekatan “menunda cita-cita” ini dimungkinkan dengan diterimanya *manhaj* dakwah yang gradual. Saat ini, perjuangan PKS adalah memasukkan warna (substansi Islam) dalam sistem negara kebangsaan dan aturan perundang-undangan yang ada karena strategi inilah yang mungkin dan bisa dilakukan saat ini.

3. Pembebasan Palestina dan negara-negara Islam lain dari penjajahan bangsa asing

Salah satu isu penting perjuangan PKS adalah menghimpun dukungan bagi perjuangan umat Islam di berbagai negara: Bosnia, Palestina, Afghanistan, Chesnya, dan Irak. PKS secara konsisten memberikan dukungan politik pada negara-negara tersebut, baik melalui altivitas di parlemen, lobi-lobi ke negara-negara penting, pernyataan-pernyataan pers, hingga pengerahan massa, baik dalam bentuk demonstrasi maupun Rapat Akbar. Selain itu, PKS juga memberikan bantuan dalam bentuk donasi. Sebagai contoh, PKS mengumpulkan dana bagi perjuangan Palestina dengan tema *one men one dollar*. Dari gerakan ini, PKS berhasil mengumpulkan 6 miliar rupiah.

Dalam konteks inilah PKS sangat anti Israel, clan sering disalahpahami sebagai antri semit (anti Yahudi). PKS merupakan pihak yang paling keras menentang kebijakan pemerintah yang lunak kepada Israel, seperti rencana pemerintah membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Dalam konteks ini pula PKS (ketika masih berupa gerakah Tarbiyah) juga turut membantu mobilisasi Mujahidin ke Afghanistan. Demikian pula ketika PKS melakukan berbagai lobi, hingga aksi

massa untuk melawan agresi AS ke Afghanistan dan Irak.

4. **Membantu Minoritas Muslim**

Salah satu aktivitas PKS adalah mendukung perjuangan muslim Bosnia, Khasmir, Muslim Moro, Pattani, dan muslim Chesnya. Agenda ini bahkan telah dilakukan sejak era 1990-an bersama dengan KISDI (komite Solidaritas Dunia Islam) pimpinan Ahmad Sumargono. Saat itu, kader Tarbiyah melakukan berbagai aksi solidaritas dengan berbagai bentuknya, mulai dari demonstrasi, press conference, Tabligh Akbar, hingga lobi-lobi politik.⁷⁵

Para kader PKS, baik yang duduk di birokrasi maupun dalam gedung parlemen terlihat berupaya mempengaruhi delegasi Indonesia dalam forum-forum internasional untuk mendukung, mensupport dan memihak kepentingan muslim minoritas untuk meraih kedaulatannya.

5. **Persatuan umat Islam (*Khilafah Islamiyah*)**

Dalam berbagai tulisan dan artikelnya, para tokoh PKS sesungguhnya memiliki impian terwujudnya Khilafah Islamiyah. Khilafah Islamiyah merupakan muara akhir dari perjuangan politik partai

⁷⁵ Wawancara Imdadun Rahmat dengan Ahmad Sumargono, (19 September 2007).

dakwah ini. Abu Ridlo, salah seorang tokoh PKS, misalnya, mengatakan bahwa agar kaum muslimin mampu merealisasikan tujuan-tujuan sosial dan politik (*siyasa*) Islam sehingga memiliki tatanan mandiri yang terbebas dari pengaruh tatanan lainnya, diperlukan tegaknya sistem khilafah yang berlandaskan *manhaj* kenabian.⁷⁶

Akan tetapi, untuk saat ini Khilafah Islamiyah tidak menjadi agenda inti PKS. Pendekatan perjuangan (*manhaj* dakwah) PKS yang menganut metode bertahap, serta evolusioner, membuat partai ini lebih konsen memperjuangkan berlakunya syari'at Islam dalam koridor konstitusional. Bahkan, dalam benak kader PKS, cita-cita berdirinya negara Islam di Indonesia pun diletakkan dalam prioritas “yang kesekian”. Agenda-agenda tersebut sangat bersinggungan dengan agenda IM.⁷⁷

C. PKS dan Pluralisme

PKS dengan agenda memperjuangkan Islam kerap kali berbenturan dengan asas-asas pluralisme yang memberikan pengakuan akan keabsahan perbedaan dan

⁷⁶ Abu Ridlo, *Saat Dakwah Memasuki Wilayah Politik*, (Bandung: Syamil, 2003), hlm.26.

⁷⁷ Mengenai agenda IM ini, lihat Ali Abdul Halim Mahmud, *Ikhwanul Muslimin Konsep Gerakan Terpadu*, jilid. I, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm.64.

keragaman. Pluralisme menuntut penghormatan pada keberagaman, baik terkait dengan budaya, ras, bahasa, ideologi, agama maupun keyakinan. Wujud penghormatan tersebut adalah adanya jaminan bagi ekspresi atas keberagaman tersebut, termasuk pada kebebasan berkeyakinan, memeluk agama dan menjalankan ajaran yang diyakininya (*religious freedom*). Pluralisme menentang segala bentuk hambatan, gangguan, pemaksaan, intimidasi, atau kekerasan terhadap semua ekspresi masing-masing keyakinan. jaminan kebebasan ini hanya bisa dibatasi oleh hukum yang berlaku.

Asas pluralisme juga menuntut persamaan hak-hak politik dan persamaan di depan hukum bagi seluruh warga negara tanpa membedakan ras, jenis kelamin, golongan, maupun agama. Segala bentuk diskriminasi berdasarkan apa pun, termasuk terhadap kaum minoritas, adalah bertentangan dengan asas pluralisme.

Asas pluralisme ini oleh *founding fathers* Indonesia diterjemahkan dengan memberikan kedudukan yang sama kepada semua agama. Praktiknya, negara berlaku netral terhadap semua agama dengan tak ada satu agama pun yang menikmati prevelege berstatus lebih tinggi di atas yang lain. Pluralisme memberikan jaminan atas perlakuan yang sama tanpa diskriminasi terhadap kelompok mana pun. Oleh karena itu, segala upaya pemberlakuan hukum-hukum agama secara

formal dalam hukum dan aturan publik akan dengan sendirinya bertentangan dengan asas pluralisme ini. Dalam hal ini, Pancasila berperan sebagai payung bersama (common denominator) bagi segala agama dan keyakinan yang ada di negeri ini. Dengan menerapkan hukum-hukum netral agama maka rasa keadilan dan kesetaraan bisa dirasakan oleh semua pemeluk agama, khususnya kalangan minoritas.

Selain itu, secara budaya, pluralisme menuntut adanya kesiapan semua pihak untuk menerima secara tulus atas perbedaan dan keragaman. Kesadaran akan pluralisme mensyaratkan kemauan untuk hidup bersama secara harmonis, saling menghormati, dan saling bekerja sama. Setiap kecurigaan antar kelompok, kebencian, dan permusuhan akan menjadi halangan bagi pluralisme.

Sebagai partai dakwah yang mendasari langkah politiknya dengan ideologi Islam, PKS mengagendakan pemberlakuan syari'at Islam sebagai hukum publik. Upaya ke arah itu dilakukan dengan memasukkan unsur-unsur yang menguntungkan dakwah Islam dalam pembuatan perundang-undangan, termasuk dalam pembuatan peraturan-peraturan daerah. Hal ini sering kali melahirkan kecemburuan di kalangan umat agama lain. Dengan perkembangan ini umat agama minoritas merasa dianaktirikan dan tercederai rasa keadilan dan kesetaraan mereka di depan negara. Ekspresi kecemburuan ini bisa berbentuk ketidakpuasan diam-diam,

protes terbuka, hingga membuat agenda atau rancangan penerapan nilai-nilai agama mereka sebagai aturan publik, seperti yang berkembang di Papua dengan Perda Kota Injil dan di Bali dengan, perda-perda berbasis kepentingan Hindu Balinya.

Selain itu, hal yang sering menjadi sorotan pihak lain terhadap PKS adalah kuatnya paham sektarianisme. PKS ditengarai sebagai partai para aktivis Tarbiyah yang kental dengan warna eksklusifnya, baik terhadap kelompok lain dari umar Islam sendiri maupun pada non-muslim. Kalangan kader PKS juga dikenal gemar beretorika anti konspirasi Barat Kristen dan anti-Yahudi.⁷⁸ Mengenai sorotan publik terhadap PKS terkait dengan hal ini mendapat tanggapan beragam dari para tokoh PKS:

KH. Ahzami Sami'un berpendapat bahwa Islam menghargai pluralitas. *At-Ta'addudiyah* (keragaman) adalah keniscayaan. Nabi sendiri tidak bisa mengislamkan manusia sedunia. Oleh karena itu, menentang keragaman berarti menentang sunnatullah. Ini dipahami oleh PKS. Jadi tidak ada *tanaqudz* (pertentangan) antara PKS sebagai partai dakwah dengan realitas di Indonesia ini yang bermacam-macam. Setiap dai menghadapi masalah ini. Rasulullah sendiri menghadapi

⁷⁸ Antony Bubalo, Greg Fealy, *Joining The Caravan? The Middle East, Islamism, and Indonesia*, (Alexandria: Lowy Institute, 2005), hlm. 72.

hal ini, baik ketika masih di Makah maupun setelah hijrah ke Madinah.⁷⁹

Tokoh PKS yang berlatar belakang NU ini menuturkan:

“Kalau ada orang yang mengatakan nanti kalau tegak syari'at Islam pluralisme menghadapi bahaya, siapa bilang. Ada seorang Yahudi yang mengatakan saya tidak mengalami masa nikmatnya ibadah kecuali pada zaman Umar bin Khattab. Bahkan dalam Al-Qur'an sendiri (dinyatakan bahwa-ed.) kita tidak boleh memaksa orang untuk masuk Islam. Bahkan dalam sirah nabawiyah dijelaskan bahwa ketika Sahabat Rasulullah mengirim pasukan perang, mereka dipesan "Jangan kau ganggu orang beribadah dan tempat ibadahnya, jangan kau bunuh kaum wanita, anak-anak kecil yang, tak ikut perang. Jangan kau tebangi pohon-pohon". Itu di saat perang, apalagi di saat damai. Begitu indahny Islam itu. Ini kan bagian dari moderatnya Islam, tetapi tak semua orang memahami. Tetapi kalau orang tak paham Islam, jangankan di saat perang, di 'saat damai pun tidak aman. Jangankan manusia, pohon pun ditebangi hanya karena perbedaan di antara ormas Islam”⁸⁰

Tokoh PKS yang lain, Suswono, menegaskan komitmennya pada jaminan akan perlindungan terhadap keberagaman. Realitas kehidupan di Indonesia adalah plural. Dan, Islam sendiri mengakui pluralitas. Konsekuensinya, *la ikraha fi ad-din* (tidak ada paksaan dalam beragama). Akan tetapi, kewajiban PKS adalah selalu melakukan dakwah.

⁷⁹ Wawancara Imdadun Rahmat dengan KH. Ahzami Sami'un, (15 Agustus 2007).

⁸⁰ *Ibid.*

Sebab, bisa jadi orang belum bisa menerima Islam yang begitu luhur dan mulia ini karena ketidaktahuannya. Jika mereka sudah tahu, bisa jadi mereka akan memeluk Islam. Selain itu, ada persoalan *hidayah* (petunjuk) yang merupakan urusan Allah. Jadi, tugas kita hanya menyampaikan, bukan memaksa.⁸¹

Bagi Suswono, ini menunjukkan bahwa realitas kehidupan adalah plural. Oleh karena itu, yang terpenting dalam berinteraksi sosial adalah menghindari terjadinya distorsi komunikasi. Di sini PKS selalu membangun komunikasi yang intens dengan berbagai pihak, dengan organisasi mana pun, baik dengan kalangan Cina, seperti Matakin, maupun dengan kalangan Hindu, seperti Walubi. Jadi, dengan organisasi-organisasi di luar Islam, PKS pun selalu membangun komunikasi.⁸²

Menanggapi keberatan non-muslim mengenai penerapan syari'at Islam sebagai hukum formal, Masyhadi mengatakan bahwa hal tersebut tidak tepat. Pandangan bahwa penerapan syari'at Islam akan mendiskriminasikan kaum non-muslim tidaklah beralasan. Sebab, justru jika bangsa ini menghalangi formalisasi syari'at Islam maka umat Islam yang mayoritas inilah yang terdiskriminasi, sebagaimana pada masa lalu, di

⁸¹ Wawancara Imdadun Rahmat dengan Suswono, (3 September 2007).

⁸² *Ibid.*

mana umar Islam justru tertindas dan umat non-muslim dianakemaskan.⁸³

Mustafa Kamal mengakui bahwa di kalangan PKS terdapat banyak benturan terkait dengan sikap terbuka dan pluralis. Dalam hal ini PKS sedang membangun sikap yang lebih inklusif di kalangan internalnya. PKS tidak untuk dirinya sendiri. Dia menjadi sarana untuk melayani bangsa ini. Jika dipercaya memimpin, PKS akan siap, namun tetap dengan kontrol dari masyarakat dan konstitusi kenegaraan. Ini yang menjadi tantangan. Harapan masyarakat terhadap PKS itu ada, namun hal ini tergantung PKS-nya juga. Ia harus mampu membuktikan bahwa ia mengayomi pluralitas bangsa, dan memberikan jawaban-jawaban yang solutif dan konkret terhadap persoalan-persoalan masyarakat. Musthafa Kamal menyadari bahwa jika cuma bisa bermain di arena normatif berwawasan sempit, hanya bermain pada urusan-urusan internal dirinya atau umat Islam saja, PKS tidak akan mendapat kepercayaan dari publik, apalagi dari masyarakat dunia. Menurutnya, tugas PKS adalah memberikan jawaban terhadap pluralitas yang ada dan solusi-solusi konkret.⁸⁴

⁸³ Wawancara Imdadun Rahmat dengan Masyhadi, (9 September 2008).

⁸⁴ Wawancara Imdadun Rahmat dengan Mustafa Kamal, (3 September 2007).

Mengenai pluralisme, PKS memiliki rumusan yang terinspirasi dari praktik Rasulullah Saw. ketika menerapkan Piagam Madinah. Di bawah semangat piagam tersebut, berbagai kelompok agama mendapat hak yang sama untuk melaksanakan agamanya. Di masa Rasulullah tersebut, umat beragama yang berbeda-beda bisa saling menghormati, bekerja sama dan saling bahu-membahu melindungi Madinah dari serbuan musuh dan bersama-sama membangun Madinah. Contoh inilah yang mendasari rumusan PKS menyangkut keragaman agama.⁸⁵

Merespons keragaman ini, PKS merumuskan konsep “masyarakat madani”. Masyarakat madani terinspirasi dari Piagam Madinah yang dibuat oleh Rasulullah yang mengandung ketentuan bagi kesepakatan hidup bersama antara umat Islam dengan umat Kristen dan Yahudi secara damai. Piagam Madinah menyerukan saling menghargai clan melindungi antara pihak muslim dengan non-muslim. Dalam negara Madinah, kaum non-muslim diperlakukan dengan baik, terhormat, dan tidak dizalimi.⁸⁶ Dalam konteks ini, keterlibatan non-muslim dalam kepengurusan dan calon anggota legislatif

⁸⁵ Hidayat Nur Wahid, “Upaya Mewujudkan Konstitusi yang Adil dan Demokratis”, dalam DPP PKS, *Dari Kader Untuk Bangsa: Refleksi dan Wacana Perjuangan Kader-Kader PKS*, (Bandung: Fitrah Rabbani, 2007), hlm. 90-91.

⁸⁶ Wawancara Imdadun dengan Mustafa Kamal, (2 januari 2008).

PKS di daerah-daerah mayoritas non-muslim dipahami sebagai pengamalan dari konsep Piagam Madinah.

Berkaitan dengan isu diskriminasi akibat penerapan syari'at Islam, PKS mengusulkan agar setiap agama diberikan hak yang sama untuk menetapkan hukum-hukum agama masing-masing. Dengan demikian, menurut PKS, agama-agama tidak merasa diperlakukan secara tidak adil. Bahkan, dengan cara inilah negara tidak merampas hak warganya untuk mengekspresikan keyakinan keagamaannya, dan negara sangat memerlukan kehadiran agama untuk menyelesaikan berbagai krisis yang mendera.⁸⁷

Dalam kerangka inilah, ketika tuntutan mengembalikan Piagam Jakarta ditolak, PKS bersama Fraksi Reformasi mengusulkan alternatif amandemen terhadap ayat 1 pasal 29 UUD 1945 yang berbunyi: Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan ajaran agama bagi masing-masing pemeluknya". Menurut Hidayat Nur Wahid, dengan rumusan yang ia sebut sebagai "Piagam Jakarta yang berwawasan Piagam Madinah" ini, phobia yang biasanya dikemukakan kalangan yang tidak setuju Piagam Jakarta, yakni adanya diskriminasi dan disintegrasi bangsa terjawab tuntas.⁸⁸

Hidayat menyajikan contoh penerapan syari'at Islam di Aceh dan penerapan ajaran Hindu di Bali. Menurutny,

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ *Ibid.*

pemberlakuan syari'at Islam di Aceh hanya ditujukan kepada umat muslim saja. Ia terbukti tidak dipaksakan kepada umat agama lain dan bahkan tidak membuat umat non-muslim menjadi tidak nyaman hidup di Aceh karena pemberlakuan syari'at Islam tersebut. Demikian juga di Bali. Masyarakat Hindu Bali telah menerapkan hukum agama Hindu berdasarkan Peraturan Daerah. Ketentuan itu tidak dianggap inkonstitusional. Pemberlakuan desa adat Banjar dan adanya polisi adat Pecalang dianggap sesuatu yang positif. Dengan demikian, pemberian hak secara sama rata kepada pemeluk agama-agama di Indonesia merupakan jalan yang bisa ditempuh untuk menghindarkan kekhawatiran mengenai diskriminasi.⁸⁹

Mengenai adanya berbagai peraturan khusus yang menjadi konsekuensi penerapan ajaran agama-agama sebagai hukum formal, Hidayat berpendapat bahwa hal tersebut merupakan hal yang mungkin untuk dilakukan, dan pada praktiknya, telah dilakukan. Sebagai contoh, proses pensyari'atan di Aceh ditempuh secara legal dan konstitusional, digodok sejak pemerintahan Habibi, Gus Dur, Megawati, dan disahkan pada pemerintahan SBY tanpa menimbulkan ketegangan politik. Di Bali, ajaran Hindu diberlakukan melalui Perda. Masyarakat diwajibkan tunduk pada Perda tersebut. Sekadar contoh, di Bali, peraturan tentang

⁸⁹ *Ibid.*, hlm. 92-93.

keharusan untuk menghentikan segala aktivitas pada hari raya Nyepi, termasuk kepada masyarakat non-Hindu, ternyata tidak mengundang kecurigaan, dan apalagi protcs. Ini mengandung arti bahwa meskipun Bali merupakan bagian dari yurisdiksi Indonesia, namun di sana berlaku ketentuan khusus.⁹⁰

Jika kita melihat paparan di atas maka akan terlihat bahwa meskipun rumusan sikap terhadap pluralitas yang terinspirasi dari Piagam Madinah ini tampak ideal, ia tetap saja bernuansa ideologi Islam. Konsep ini berbeda dengan rumusan Masyarakat Madani yang dikemukakan oleh Nurcholish Madjid, di mana nilai-nilai pluralisme dalam Piagam Madinah diletakkan dalam konteks demokratisasi dan penguatan negara bangsa modern (*modern nation state*), di mana asas Pancasila tetap menjadi payung bersama.⁹¹ Konsep yang bersumber dari pengalaman Negara Madinah ini tetap menuntut penerapansistem dan hukum Islam dan supremasi politik Islam atas kaum non-muslim. Pluralisme dalam konsep “masyarakat madani” bisa dipahami sebagai bahasa lain dari konsep *dzimmi* (perlindungan) dalam sistem politik Islam dan dalam rumusan fiqh klasik, di mana non-muslim yang hidup damai dalam

⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹ Nurcholish Madjid, “Pengantar (2) Masyarakat Madani dan Investasi Demokrasi: Tantangan dan Kemungkinan”, dalam Ahmad Baso, *Civil Society Versus Masyarakat Madani: Arkeologi Pemikiran ‘Civil Society’ dalam Islam Indonesia* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999), hlm. 17-34.

lingkungan kekuasaan Islam, tunduk pada supremasi kekuasaan dan syari'at Islam, dilindungi dan dipenuhi hak-hak keagamaannya. Dengan demikian, pengakuan terhadap hak-hak non-muslim bergantung pada ketundukan pada sistem Islam.

Kuatnya bingkai ideologis Islam dalam penerimaan PKS terhadap konsep-konsep derivative dari sistem nation state menyebabkan kesan ambigu yang sangat kental. Di satu wajah PKS mencitrakan diri sebagai partai inklusif dan bervisi kebangsaan, namun di wajah yang lain tampak kuat eksklusifisme Islam ideologisnya. Dari kenyataan ini memunculkan dua kemungkinan menyangkut penerimaan PKS terhadap pluralisme, Pancasila, dan demokrasi. Praktik politik PKS yang mengarah ke inklusivitas dalam wujud koalisi PKS dengan berbagai partai nasionalis dan bahkan dengan partai berasas Kristen serta penerimaan yang retorik terhadap asas-asas kebangsaan oleh khalayak politik PKS sendiri dimaknai dan dimaksudkan sebagai semata-mata “siasat” atau hal ini dimaknai dan diniatkan sebagai sebuah pencarian titik temu yang serius.

Menurut hemat penulis, arus ke arah moderasi yang tampak, misalnya, pada rekomendasi yang dihasilkan PKS pada Mukernas di Bali awal Februari 2008 merupakan langkah maju bagi partai dakwah ini. Rekomendasi yang menyerukan peneguhan kembali semangat kebangsaan serta penegasan

bahwa PKS tidak anti pluralitas⁹² mencerminkan menguatnya keberadaan fraksi moderat yang ingin lebih adaptif terhadap kondisi negara bangsa. Akan tetapi sangat disayangkan, pernyataan ini kemudian dibantah oleh kalangan PKS sendiri. Oleh karena itu, tidak bisa diingkari bahwa bagi sebagian besar kalangan PKS, pernyataan itu dimaksudkan dan dimaknai tidak lebih dari sekedar langkah strategis demi kepentingan meluaskan pendukung PKS untuk menaikkan suara pada Pemilu 2009.

Melihat PKS yang berwajah ganda maka bisa dipahami jika kekhawatiran tentang adanya “hidden agenda” berupa formalisasi syari’at Islam yang ujung-ujungnya mengganti bentuk negara kebangsaan dan menggeser Pancasila sebagai payung bersama semakin meluas. Konsolidasi paham kebangsaan yang dilakukan DPP Golkar dan DPP PDIP beberapa waktu yang lalu merupakan ekspresi dari kekhawatiran tersebut.⁹³ Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa kesan yang mengemuka terhadap PKS tetaplah citra yang eksklusif. Upaya untuk menggeser pencitraan PKS yang dilakukan oleh elit-elitnya kurang mampu mengurangi watak

⁹² *Kompas*, 4/2/2008.

⁹³ DPP Golkar dan DPP PDI-P pada pertengahan 2007 menggelar beberapa kali pertemuan besar yang agendanya adalah meneguhkan kembali komitmen terhadap asas-asas kebangsaan. Pertemuan itu dipicu oleh mengemukanya wacana penerapan syari’at Islam yang diusung oleh partai-partai Islam, khususnya PKS.

asal PKS yang memang berangkat dari gerakan tersembunyi yang eksklusif. Hingga kini, sebagian besar konstituen utama dari gerakan Tarbiyah merupakan penganut salafisme yang anti sekularisme ala Indonesia dan juga produk pemikiran Barat meskipun dari waktu ke waktu mengalami pergeseran ke arah yang lebih moderat sebagai akibat keterlibatan mereka dalam dunia politik-kepartaian.

D. PKS: Genre Baru Islam Indonesia

Dilihat dari perspektif sosialogis maupun teologis, Tarbiyah PKS merupakan genre baru Islam Indonesia. Jika sebelumnya dikenal ada tiga kategori: Islam tradisional, Islam modernis, dan Islam neomodernis atau Islam posttradisional, maka Tarbiyah PKS tidak bisa digolongkan dalam Salah satu dari kategori-kategori tersebut.

Tarbiyah PKS bukanlah kaum Islam tradisional yang memiliki semangat dasar melestarikan dan memelihara paham dan penafsiran Islam yang telah mapan di Indonesia. Kalangan tradisional yang dimotori oleh organisasi NU, Al-Washliyah,, Mathlul Anwar, Perti, dan Nahdlatul Wathan ini memiliki ciri-ciri: *pertama*, akomodasionis terhadap kultur Islam lokal, seperti selamatan (tahlilan) pascakematian, menghormati dan menziarahi makam para wali, tradisi khaul (pengajian dan pembacaan doa pada peringatan hari kematian para leluhur), membaca al-Barzanji dan manakib para wali, serta tradisi ilmu

kanuragan (mistik). Terkait dengan kultur lokal ini, kalangan tradisional melakukan pembersihan dan pemurnian pada aspek muatan dan isi ritual dari sisa-sisa paganisme dan Hindu Budha, namun tetap mengakomodir bentuk dan Wadahnya. Selain itu, tingkat pemurnian yang dilakukan lebih longgar dan dilakukan dengan cara bertahap dan nyaris tidak kentara; *Kedua*, menjadikan para kiai sebagai panutan dalam beragama maupun rujukan dalam menyelesaikan persoalan kehidupan, serta menjadikan budaya pesantren sebagai identitas kultural. *Ketiga*, kecenderungan untuk bertaqlid kepada para ulama terdahulu, khususnya para Imam madzhab. *Keempat* menjadikan kitab-kitab kuning (kitab-kitab yang ditulis para ulama Islam abad pertengahan) sebagai pembentukan tradisi intelektual keagamaan mereka. *Kelima* menjadikan tradisi tasawuf (tarekat) sebagai jalan penyempurna keislaman mereka. Dan, *keenam*, tidak menjadikan aktivisme politik kekuasaan sebagai bagian integral dari kesalehan seseorang. Akan tetapi, Islamisasi kehidupan diwujudkan dalam bentuk penyempurnaan *amaliyah-ubuddiyah* masyarakat yang lebih ortodoks melalui dakwah dan pendidikan.

Tarbiyah PKS juga bukan bagian dari Islam modernis yang menggabungkan antara semangat purifikasi (kembali pada ajaran Al-Quean dan As-Sunnah yang murni) dan kemodernann dalam ajaran dan agenda perjuangan mereka. Kalangan Islam modernis menyuarakan pembersihan Islam

dari unsur-unsur luar yang mengotori Islam yang dikategorikan sebagai bid'ah, syirik, dan khurafat. Tradisi-tradisi lokal yang selama ini dilestarikan kalangan tradisionalis menjadi sasaran pemurnian. Di sisi lain, kalangan Islam modernis menolak taqlid kepada para imam madzhab dan menyerukan penggunaan rasio untuk berijtihad. Dalam kerangka mengedepankan ijtihad ini, kalangan modernis menyerukan untuk meninggalkan pemikiran para ulama salaf (kitab kuning), termasuk meninggalkan pemikiran para imam madzhab. Penggunaan rasio ini juga diperlukan dalam rangka mencari pemahaman-pemahaman yang baru terhadap ajaran Islam sebagai ekspresi keberpihakannya pada kemajuan dan modernitas. Kalangan modernis juga tidak anti Barat, dan bahkan sebaliknya banyak mengadopsi gagasan-gagasan dari Barat.⁹⁴

⁹⁴ Kaum Islam modernis di Indonesia diwakili oleh dua kecenderungan : *pertama, gerakan* rektifikasi (rectification) yakni gerakan pemurnian yang dilakukan dengan cara rigid dan keras dan langsung mengarah pada perubahan pemahaman keislaman yang murni. Gerakan ini mirip dengan gabungan pemikiran Muhammad Ibn Abdul Wahhab dan Rasyid Ridla. Gerakan Paderi di Sumatera Barat, PERSIS, dan Al-Irsyad mewakili kecenderungan ini. *Kedua*, purifikasi yang dilakukan dengan cara akomodasionis disesuaikan dengan modernitas. Model pemurnian yang lebih longgar dan lebih banyak merujuk pada gabungan pemikiran Muhammad Ibn Abdul Wahhab dan Muhammad Abduh ini diwakili oleh Muhammadiyah. Akan tetapi, secara umum, modernitas yang disuarakan Muhammadiyah lebih tampak sebagai fenomena artifisial karena berbenturan secara frontal dengan purifikasi dan literalisme ala Abdul Wahhab. Itulah sebabnya, semangat ijtihad, rasionalisme, dan

Tarbiyah PKS bahkan juga memusuhi kalangan yang dikategorikan sebagai kalangan Islam neomodernis atau postradisional. Kalangan “konvergen” tradisional-modernis (memadukan antara warisan intelektual klasik (kitab kuning) dengan pendekatan analisis rasional) ini dianggap telah menyebarkan pemahaman yang liberal terhadap ajaran Islam. Mereka tidak disukai oleh para pendukung Tarbiyah PKS karena agenda-agenda yang mereka lakukan, seperti anjuran menafsirkan ajaran Islam secara lebih rasional dan kontekstual. Selain itu, kampanye mereka tentang toleransi, kerja sama antar agama, dan pluralisme dianggap telah melemahkan semangat dakwah dan melemahkan komitmen pada kejayaan Islam. Kritik kalangan ini terhadap agenda penerapan syari’at Islam dalam kerangka hukum formal juga bertabrakan secara frontal dengan PKS.

Tarbiyah/PKS yang berakar pada pemikiran Ikhwanul Muslimin ini menempatkan diri sebagai kritik clan penyempurna (perfeksi) dari jenis-jenis gerakan Islam yang telah ada. Di satu sisi, PKS menyerukan untuk memurnikan Islam dari pengaruh asing, menganjurkan untuk memahami Islam secara lebih leterlek (harfiah) dan membatasi

menerima pemikiran Barat ala Muhammad Abdu ladang HMI bahkan di kalangan pesantren yang disebut sebagai kaum tradisional ladang HMI bahkan di kalangan pesantren yang disebut sebagai kaum tradisional.

penggunaan akal dalam memahami Al-Qur'an dan hadits. Ini merupakan

Watak dasar kaum fundamentalis-puritanis. Akan tetapi, PKS menghendaki cara yang lebih lunak dan bertahap seperti yang dipraktekkan kaum tradisional. Di sisi lain, PKS juga tidak meninggalkan begitu saja para ulama klasik dan para imam madzhab. Oleh karena itu, dalam menyikapi isu bid'ah dan khurafat, PKS menerima praktek keagamaan kaum tradisional sejauh ada dasar dari pendapat ulama terdahulu. Di sini, PKS bisa dikatakan sebagai “jembatan” antara kaum tradisional dan modernis sekaligus perfeksi dari keduanya.⁹⁵ Akan tetapi, karena kehadirannya berpretensi sebagai penyempurna dari keduanya, PKS justru kurang berhasil dalam “menjembatani” kaum tradisional dan modernis dan justru berhadap-hadapan dengan keduanya.

Aspek berikutnya dari penyempurnaan yang diagendakan PKS adalah menjadikan politik sebagai bagian penting dari agama. Dalam bangunan ajaran keislaman PKS, aktivisme politik menempati posisi yang sangat penting. Bagi kalangan Tarbiyah PKS, menjadi seorang muslim yang paripurna tidak saja menuntut kemurnian iman dan Islam,

⁹⁵ Pendapat bahwa PKS merupakan titik temu sekaligus penyempurna dari tradisionalisme dan modernisme Islam dikemukakan oleh Yon Mahmudi dalam Yon Mahmudi, Partai Keadilan Sejahtera: Wajah Baru Islam Politik Indonesia, (Bandung: Harakatuna Publishing, 2005), hlm. 95-99.

tetapi juga komitmen untuk memperjuangkan cita-cita ideologis Islam. Islam *kaffah* yang menjadi jargon PKS menghimpun semangat Islam fundamentalis-Islamis dengan pendekatan akomodasionis dan gradualis.

Namun demikian, sejalan dengan tantangan keindonesiaan yang dihadapi, baik oleh politisi PKS maupun para dai dan ulamanya, jalan moderat “terbatas” yang dianut PKS belumlah cukup menyelesaikan ketegangan. Oleh karena itu, PKS tetap dituntut untuk melakukan perubahan-perubahan terkait dengan pemahaman keislamannya. Secara perlahan, perubahan tersebut telah tampak di kalangan elit PKS, namun masih sangat samar di kalangan mayoritas kader. Meskipun perubahan itu tidak menyentuh hal yang fundamental, adaptasi dan penyesuaian terhadap konteks Indonesia telah menjadi kebutuhan di kalangan PKS dan menjadi fenomena menarik untuk diamati.

Perkembangan PKS ke arah yang lebih moderat dan makin akomodatif terhadap tradisi keagamaan Islam di Indonesia dipengaruhi beberapa hal: *pertama*, semakin banyaknya para alumnus Timur Tengah dengan tradisi akademik Syari’ah dan tafsir Al-Qur’an.

Disiplin ilmu Syari’ah dan Tafsir mengkondisikan para pengkajinya terbiasa dengan berpikir metodologis ala ushul fiqh dan qawa’id at-tafsir. Selain itu, keragaman pendapat

dalam fiqh dan kitab-kitab tafsir mengajarkan kepada mereka bahwa pemahaman terhadap Islam tidak selalu tunggal.

Kedua, untuk mengontrol perolehan suara di pemilu legislatif, para aktivis PKS dituntut untuk keluar dari kampus dan bergerak di masyarakat. Di lapangan yang lebih luas ini para kader PKS dihadapkan pada masalah yang makin kompleks. Metode Tarbiyah di kampus tidak lagi cukup untuk meraih anggota yang cukup signifikan. Oleh karena itu, mereka dituntut mengubah strategi dengan beradaptasi dengan apa yang telah mapan di masyarakat dengan menarik batas toleransi lebih longgar. Mereka berkepentingan untuk menjadikan tradisi-tradisi agama seperti tahlilan, selamatan, barzanji, dzikir, dan sebagainya sebagai sarana dakwah. Selain itu, lembaga-lembaga agama yang mapan, seperti masjid, mushalla, langgar, majelis taklim, pesantren, dan madrasah' telah terlanjur memiliki tradisi yang khas Indonesia sehingga PKS berkepentingan untuk masuk dan menjalankan dakwahnya serta meluaskan pengaruh politiknya.

Ketiga, masuknya para dai dari pesantren yang berkultur NU cukup mewarnai pemahaman keagamaan di PKS. Bahkan, sebagian besar para anggota Dewan Syari'ah adalah mereka yang memiliki latar belakang pesantren dan kultural kiai yang kuat. Oleh karena itu, fatwa-fatwa hukum yang dikeluarkan Dewan Syari'ah PKS cenderung ke arah moderasi. Akan tetapi, tampaknya pengaruh kultur NU di PKS

masih terbatas pada fatwa fiqh dan belum pada perubahan karakter pemahaman Islam di jaringan Tarbiyah dan kader-kader PKS di tingkat bawah.

Keempat, pertumbuhan keilmuan dan kepribadian para aktivis PKS ke arah kedewasaan dan kematangan juga berperan dalam mengubah partai ini menjadi lebih bijaksana dalam berdakwah. Mereka tidak lagi mengandalkan *hamasah* (semangat) dan militansi semata, tetapi juga kearifan dan kebijaksanaan.

Kelima, adanya upaya PKS untuk mendapatkan legitimasi politik maupun keagamaan dengan Cara menampilkan PKS sebagai partai Islam yang berakar sejarah Indonesia. Oleh karena itu, ada upaya untuk mengurangi dominasi pemikiran para ulama IM dalam pemikiran keagamaan PKS dan mulai ada upaya menghadirkan pemikiran-pemikiran ulama dan aktivis Islam Indonesia, seperti Muhammad Natsir, Agus Salim, Muhammad Rasyidi, dan Hasbi Assyiddiqi.

Keenam, adanya upaya dari para top leader-nya untuk mengedepankan pemikiran ulama-ulama yang lebih moderat, seperti pemikiran *mu'assis* awal IM, Hasan al-Banna, Hasan al-Hudzaibi, Musthofa asy-Syiba'i, dan Yusuf al-Qaradhawi. Dalam proses moderasi pemikiran ini, peran al-Qaradhawi terlihat menonjol. Dia dikenal sebagai tokoh Ikhwan yang menyuarakan pendekatan *washatiyyah* (moderat) dalam

perjuangan.⁹⁶ Pemikiran Sayyid Quthb yang lebih radikal, yang pada masa awal sangat berpengaruh di kalangan kader PKS pelan-pelan diimbangi dengan pemikiran mereka. Hal ini berkaitan dengan kepentingan untuk menepis tuduhan terhadap PKS sebagai partai Islam radikal.

⁹⁶ Ia menjadi rujukan pemikiran kalangan aktivis Islam dari soal politik internasional hingga hukum Islam menyangkut kehidupan sehari-hari. Karya-karyanya telah diterjemahkan ke berbagai bahasa, termasuk Indonesia, sehingga ia sangat berpengaruh di dunia Islam. Lihat Anthony Bubalo, Greg Feaiy, *Joining The Caravan? The Middle East, Islamism And Indonesia*, (Alexandria: Lowi Institute, 2005), hlm. 37.

BAB 4

Kesimpulan dan Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah, yaitu:

Bahwa Partai Keadilan Sejahtera lahir dari rahim gelombang kebangkitan Islam (*Islamic Revivalisme*) yang bermula dari Timur Tengah dan terus mengalir ke belahan lain dunia Islam. Di antara corak gerakan kebangkitan ini adalah revitalisasi Islamisme, yakni gerakan yang menyerukan dijadikannya Islam sebagai ideologi politik. Dilihat dari ciri dan agenda perjuangan yang ada di PKS, partai ini merupakan perwujudan dari Islamisme.

Di sisi yang lain, kelahiran PKS juga merupakan respons terhadap gelombang reformasi dan keterbukaan politik yang diperjuangkan oleh gerakan 1998. Oleh karena itu, PKS juga tampil sebagai kekuatan politik baru yang menyerukan reformasi politik, khususnya agenda pemerintahan yang bersih (*good governance*), anti korupsi dan penegasan pada komitmen kerakyatan. Dalam konteks kebebasan politik ini pula PKS menyerukan peninjauan kembali terhadap beberapa landasan kenegaraan, seperti asas ideologi tunggal Pancasila, “sekularisme”, dan tuntutan diadopsinya syari’at Islam sebagai

hukum negara yang lebih luas dari sekadar “kompilasi hukum Islam”.

Pasca-pengunduran diri Soeharto pada 1998, Jama'ah Tarbiyah mendorong pembentukan partai politik Islam dengan nama Partai Keadilan (PK) yang kemudian bermetamorfosis menjadi PKS sebagai kendaraan politik untuk mewujudkan cita-cita ideologisnya. Sebagai sebuah gerakan social-politik Islam, PKS berbasis ideologi Ikhwanul Muslimin. PKS mengadopsi hampir secara penuh pemikiran, ideologi, strategi gerakan (*manhaj*), agenda perjuangan, dan sistem pendidikan (*tarbiyah*) dari Ikhwanul Muslimin. Meskipun PKS memiliki keterkaitan kesejarahan yang kuat dengan Masyumi, namun pemikiran-pemikiran kalangan Masyumi tidak menjadi rujukan yang berarti bagi kalangan PKS. Kultur Masyumi yang dikembangkan oleh DDII hanya menyediakan lahan subur bagi semangat ideologi Islam di kalangan “gerakan Islam baru”, termasuk PKS.

Namun demikian, PKS tetap merupakan salah satu bentuk dari transformasi Masyumi yang merupakan representasi dari Islam ideologis (Islamisme) yang paling konsisten di Indonesia. Masyumi merupakan ormas Islam yang hingga akhir hayatnya mengemban cita-cita menerapkan syari'at Islam sebagai hukum negara. Hingga kini, semangat menerapkan syari'at Islam ini diperjuangkan secara simultan oleh para tokoh yang secara kultural mewarisi Masyumi, yakni

mereka yang beraktivitas di Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII) dan lembaga-lembaga mitra juangnya. Oleh mereka inilah Lembaga Dakwah Kampus (LDK) muncul dan berkembang menjadi gerakan baru Islam (*new Islamic movement*), seperti HTI, Dakwah Salafi, MMI, dan gerakan Tarbiyah PKS. Kultur ideologis Masyumi menyemangati para kader muda LDK ini untuk memperjuangkan “*Islam kaffah*” dalam arti mengedepankan Islam sebagai sistem politik kenegaraan.

Semangat memperjuangkan ideologi Islam yang diwarisi kalangan Tarbiyah PKS dari Masyumi ini memperoleh wadah berupa rumusan ideologi dan metode perjuangan yang lebih konkret dan sistematis dari Ikhwanul Muslimin (IM). Pemikiran gagasan dari para tokoh IM tersebut-terkait dengan ideologi maupun *manhaj* (metode) dakwah -diadopsi, dipelajari, dipahami, dan dipraktikkan oleh kalangan Tarbiyah PKS. Ideologi Islam yang berbasis *Islam kaffah* ini memberikan dasar argumentasi akan diwajibkannya Islamisasi politik, hukum-hukum, dan Islamisasi negara. Konsep *Islam kaffah* juga telah melahirkan komitmen dan semangat untuk mewujudkan Islam dalam berbagai segi kehidupan, termasuk dalam kehidupan bernegara.

Sedangkan *manhaj* IM memberikan *guide line* bagi prinsip-prinsip dakwah, medan dakwah, pentahapan perjuangan hingga acuan pada masing-masing tahap. Tiga

tahap perjuangan IM, yakni: *ta'arif*, *takwin*, dan *tanzhim* menjadi sebuah alur perjuangan yang sistematis bagi PKS. Pembidangan perjuangan yang meliputi *mihwar tanzhimi*, *mihwar sya'bi*, *mihwar mu'assasi* dan *mihwar dauli* menyediakan pola dakwah yang menyeluruh. Dalam keseluruhan proses tersebut, *manhaj* Tarbiyah (pendidikan dan pengkaderan) memegang peranan kunci. Dengan demikian, model Tarbiyah merupakan sumbangan terbesar IM terhadap PKS.

Pengaruh tokoh-tokoh penggagas dan pembina LDK yang berkultur Masyumi yang berciri modernis dan puritanis serta pengaruh IM yang Islamis-puritanis dan juga sangat kental warna Timur Tengahnya telah menyebabkan PKS dengan serta merta tampil sebagai kelompok yang bersemangat menyerukan kembali pada Islam yang murni khas Timur Tengah (Arab Saudi) dan cenderung memusuhi tradisi keagamaan yang berciri lokal-tradisional. Hal itu terbukti dengan sikap PKS yang tetap resistens terhadap apa yang selama ini dipandang kalangan pembaru sebagai *Tahayul*, *Bid'ah*, dan *Churafat* (IBC), meskipun hal itu ditampilkan dengan cara yang lebih halus. Hal ini menimbulkan ketegangan baru ketika PKS mendakwahkan pemahaman Islamnya di Indonesia yang pada umumnya berpaham Islam ala pesantren yang berciri akomodatif terhadap budaya dan tradisi lokal. Kehadiran PKS di kalangan umat Islam di

Indonesia ini tentu saja telah melahirkan kegundahan, kekhawatiran, dan keterancaman di kalangan “muslim tradisional” yang cenderung mempertahankan tradisi Islam yang telah ada. Oleh karena itu, tak jarang muncul penolakan dari kalangan Islam tradisional, antara lain, dalam wujud sikap berhati-hati terhadap kelompok puritanis yang sering diidentikkan dengan gerakan Wahabi.

Ideologi Islam *kaffah* yang diwarisi dari Masyumi maupun IM ini ternyata juga memiliki imbas yang lebih jauh lagi, yakni perlawanan terhadap konsep *nation state* yang dianut Indonesia. Ideologi Islam yang dilansir PKS telah berkembang menjadi semacam kompetitor baru bagi Pancasila. Konsep negara Islam telah mendesak negara “sekular religius” yang selama ini dipraktikkan di Indonesia.

Hukum syari’at telah menjadi tantangan bagi hukum perdata dan pidana umum yang berbasis hukum Barat. Semangat keislaman telah dipersepsikan sebagai “diperhadapkan” dengan semangat kebangsaan. Begitu juga kehendak untuk menjadikan Islam sebagai satu-satunya sumber konstitusi dan hukum publik telah menafikan unsur lain dari bangsa ini untuk turut membentuk dan mewarnai perjalanan bangsa ini.

Semangat untuk memperjuangkan Islam dengan gerakan dakwah, baik di kalangan masyarakat maupun di ranah politik ini, secara tak disadari telah melahirkan fanatisme Islam yang

cenderung berlebihan sehingga menimbulkan ketegangan dan jarak dengan agama lain. Tumbuhnya kecurigaan dan perasaan permusuhan dengan agama lain juga turut merenggangkan hubungan ini.

Berbekal semangat ideologis clan mengembalikan Islam pada kebenaran yang murni tersebut, di kalangan PKS juga berkembang; klaim kebenaran (*truth claim*) kelompok yang sangat menonjol. Akibatnya, kalangan PKS cenderung tidak toleran terhadap perbedaan pemahaman keislaman dengan golongan Islam lain. Oleh karena itu, kader PKS dikenal sebagai para juru dakwah yang cenderung “memaksakan kehendak” terhadap kelompok Islam lain.

Kendatipun demikian, di kalangan PKS juga terdapat nuansa pemikiran dan pemahaman keislaman serta sikap politik yang beragam dan cukup menarik untuk dicermati. Pemikiran yang tidak monolitik ini sebagian besar terkait dengan hal-hal *ikhtilafi* hukum-hukum agama dan ijtihad politik dalam wilayah strategis. Kendati demikian, perbedaan pendapat juga acap kali terjadi pada wilayah penting menyangkut implementasi dari prinsip-prinsip politik, seperti sikap terhadap amandemen UUD 1945 Pasal 29 yang lebih dikenal sebagai “pengembalian Piagam Jakarta”. Akan tetapi, oleh karena soliditas organisasi yang masih terjaga maka perbedaan tersebut bisa diatasi dengan ketundukan pada keputusan partai.

Di kalangan PKS juga berlangsung proses moderasi pemikiran keagamaan. Proses moderasi ini berupa semakin lenturnya pengamalan ajaran agama, khususnya dalam aspek-aspek *fiqhiyyah-ihthadiyyah*. Simbolisme dan formalitas yang selama ini membuat kalangan PKS terkesan eksklusif kini mulai mengendur. Mencairnya sikap sosial dan keketatan *fiqhiyyah* tersebut disebabkan oleh semakin dominannya pengaruh pemikiran fraksi moderat IM, khususnya Hasan al-Banna, Hasan Hudzaibi, dan Yusuf Al-Qaradhawi dibandingkan dengan pengaruh Sayyid Quthb yang kian melemah. Selain itu, kehadiran para ulama berbasis ilmu syari'ah (fiqh) yang sebagian berkultur NU juga turut mendorong moderasi tersebut. Akrabnya para ulama fiqh dengan perbedaan madzhab, beragamnya metodologi ijtihad, serta tidak seragamnya fatwa hukum Fiqh telah membuat mereka memiliki sikap yang toleran terhadap perbedaan. Para ulama pesantren yang lebih intensif berdakwah di masyarakat tersebut mempunyai keluwesan dalam menghadapi realitas masyarakat dan mereka inilah yang secara serius mengimplementasikan *manhaj* dakwah IM yang gradualis.

Di sisi lain, di kalangan PKS juga berlangsung moderasi sikap politik terkait dengan konteks keindonesiaan yang menganut konsep negara bangsa (*nation state*). Keterlibatan dalam proses-proses politik dalam koridor demokrasi telah menyebabkan mereka lebih realistis dan akomodatif terhadap

kenyataan ideologis negeri ini. Agar tetap berstatus legal dan *legitimate* sebagai partai politik, PKS dipaksa untuk lebih luwes dan adaptif terhadap tuntutan kebangsaan. Dampaknya, di depan publik, PKS telah berkali-kali menegaskan dirinya sebagai kalangan nasionalis tulen dan berkomitmen pada asas-asas kebangsaan, termasuk ideologi Pancasila.

Dari sini terlihat bahwa sepanjang perjalanan Tarbiyah hingga menjadi PKS saat ini, telah terjadi transformasi yang signifikan, yakni perubahan dari visi revolusioner-yang hendak mengubah secara mendasar sistem politik nation state warisan Barat menjadi sistem politik Islam (negara Islam)-menjadi tidak lebih dari sekedar pengelompokan semacam neo-fundamentalis; sebuah gerakan di mana aktivisme keagamaannya berpusat pada perjuangan memperbaiki moralitas individu dan masyarakat. Saat ini, PKS tidak lagi mengagendakan terwujudnya sistem politik baru atau model-model masyarakat baru sebagaimana dirumuskan oleh Abul Pi la al-Maududi dan Sayyid Quthb. Adapun yang menjadi fokus gerakan PKS saat ini adalah memperbesar partai, memperbanyak pendukung, memperebutkan jabatan-jabatan penting dalam pemerintahan dan implementasi syari'at Islam menjadi hukum formal. Pergeseran kecenderungan dan perjuangan PKS ini sejalan dengan perkembangan mayoritas gerakan Islamisme yang lain, baik di Timur Tengah maupun di belahan dunia lainnya.

Pragmatisme politik juga melanda PKS. Keterlibatan dan pergulatan para politisinya dalam politik kekuasaan turut menyumbang semakin lunturnya idealisme perjuangan yang semula kental dengan nilai-nilai luhur dan etika politik serta komitmen pada cita-cita kejayaan Islam. Dan, yang tak kalah penting adalah bahwa keharusan PKS untuk merekrut massa sebanyak-banyaknya turut mendorong mereka untuk bersikap lebih akomodatif terhadap realitas masyarakat yang beragam serta “logika politik praktis”.

Di tengah berjalannya arus moderasi, di PKS juga terdapat kekuatan-kekuatan konservatif yang menyerukan agar partai ini tetap teguh berpendirian dan tidak bergeser dari cita-cita semula sebagaimana ketika masih menjadi gerakan Tarbiyah. Kelompok konservatif ini tidak menyukai perubahan watak PKS yang cenderung akomodatif; kompromistik, dan apalagi pragmatis. Kelompok konservatif ini masih memiliki pengaruh paling kuat di kalangan kader-kadernya di bawah. Oleh karena itu, proses moderasi hingga saat ini masih terlihat sebagai fenomena elit dan bahkan terkesan sebagai “siasat” untuk menyembunyikan jati diri dan identitas yang sesungguhnya.

Moderasi yang disuarakan kalangan elit PKS ini ternyata belum banyak mempengaruhi para kader di bawah. Adanya gap tersebut terjadi karena paradigma, sistem, metode, dan isi dari pengkaderan yang berbasis Tarbiyah tidak mengalami

perubahan yang berarti. Hingga kini, Tarbiyah tetap bernuansa ideologis. Semangat purifikasi agama yang disertai dengan kecurigaan terhadap rasionalitas, pengaruh tradisi lokal dan pengaruh pemikiran Barat masih kuat tertanam di dalam substansi Tarbiyah. Penanaman *ghirah Islamiyyah* (semangat memperjuangkan Islam), dan semangat jihad yang disertai dengan kuatnya doktrin tentang adanya *ghazwul fikri* (perang pemikiran) dan serangan tiada henti dari musuh-musuh Islam, baik dari kalangan non-muslim maupun kalangan muslim sendiri, yang disebut “antek-antek” Barat (Yahudi-Nasrani), masih menjadi menu utama pengkaderan di Tarbiyah, bahkan untuk jenjang yang paling tinggi sekalipun. Akibatnya, arus *tawassuth* (moderasi) yang dihembuskan kalangan elit PKS tetap membentur tembok eksklusivitas hasil pengkaderan Tarbiyah.

Lantas bagaimana PKS merespons secara benar kenyataan ke-indonesiaan yang plural dan multikultural ini? Sejauh pengamatan, PKS hingga kini masih menghadapi kesulitan dalam memenej kasunyatan ini. Meskipun telah ada usaha di kalangan PKS untuk mencari titik temu, hasilnya masih tetap menyisakan persoalan. Sikap yang serba tanggung dan ambivalen terhadap berbagai konsep yang berbasis *nation state* menunjukkan kegagalan ini. Penerimaan PKS terhadap Pancasila, demokrasi, *civil right* (hak-hal sipil), pluralisme, dan NKRI masih terganjal oleh konsep-konsep ideologi

Islamnya yang ketat. Oleh karena itu, PKS masih tam pak sebagai “barang asing” yang ada dalam kancah politik Indonesia akibat ideologi Islamnya. Terkait dengan hal ini, terdapat banyak kelompok yang secara ideologis merasa terancam akibat keberadaan ideologi Islam yang diusung PKS.

Sebagai partai politik yang harus berkiprah secara nyata dalam menyelesaikan persoalan bangsa, PKS masih terjebak pada proses pencarian “asas” dan memformulasikan “legalitas”, membentuk sistem yang Islami, serta upaya-upaya memperkuat ideologi. Dalam masa pencarian ini, PKS cenderung terjebak pada eksklusivisme sehingga ia tidak mau mengacu pada prestasi dan keunggulan sistem-sistem lain selain sistem Ikhwanul Muslimin. Kencenderungan lain PKS adalah lebih berpatokan pada basis *syar’i* (pencarian legalitas syari’at) daripada analisis atas realitas. Ia berdiri hanya pada aksioma-aksioma (*fikrah mabda’iyyah*) daripada mencari rumusan pemenuhan kebutuhan riil umat. Ia juga lebih menggunakan metode deduktif (*istiqla’i*) yang berlandaskan pada penafsiran atas teks-teks agama daripada menggunakan metodologi induktif (*istiqla’i*) yang memburuhkan pengumpulan dan pengklasifikasian data-data riil. Akibatnya, PKS masih berada pada tahap produsen jargon-jargon besar ideologis dan belum menunjukkan prestasi yang menonjol dalam pembuatan konsep-konsep aplikatif; baik dalam sistem politik, hukum, maupun perekonomian.

Dari paparan panjang di depan, terdapat pertanyaan penting yang harus dijawab PKS menyangkut masa depan dan kontribusinya terhadap Islam di Indonesia. Apakah dengan paham keislaman dan watak keagamaan yang dikembangkan PKS akan membuatnya berkembang menjadi partai besar atau justru akan menyebabkannya surut dari peredaran? Apakah ideologi dan *manhaj* gerakan yang diperjuangkan PKS akan memberikan mashlahat bagi umat Islam, pada khususnya, dan masyarakat di Tanah Air pada umumnya atau justru melahirkan mudarat? Pertanyaan ini relevan diajukan karena pengalaman keagamaan di Indonesia menunjukkan bahwa berbagai kelompok agama yang tidak memiliki “kecerdasan adaptatif”, dan tidak pandai menyesuaikan diri dengan kultur Nusantara akan tergerus zaman. Sejarah politik Indonesia juga mencatat bahwa perjuangan umat melalui jalan Islamisme yang mengedepankan strategi oposisional hanya menghasilkan ketegangan hubungan dengan kekuatan politik nasionalis dan pemerintah yang berujung pada penindasan, ketidakberdayaan, dan keterpurukan.

Pilihan perjuangan PKS untuk kembali mengusung Islam ideologis sebagai lanskap perjuangannya memiliki kemungkinan menyebabkan terulangnya ketegangan antara pemerintah dengan umat Islam. Ketegangan ini di masa lalu diakui sebagai sejarah kelam umat Islam Indonesia. Sebab, dalam kondisi tersebut, umat Islam mengalami hambatan yang

besar untuk melakukan kerja-kerja dakwah dan pengembangan potensi umat.

Di masa lalu, sebagian umat Islam memperjuangkan ideologi Islam secara frontal-oposisional. Oleh karena itu, Islam dipersepsikan sebagai oposisi yang berhadap-hadapan dengan ideologi negara, kepentingan negara dan pemerintah. Walhasil, Islam diletakkan sebagai salah satu ancaman stabilitas dengan label “ekstrim kanan” yang disandingkan dengan PKI yang dilabeli “ekstrim kiri”. Gerakan ideologis Islam kemudian dibabt habis bahkan dengan kekerasan Ormas Islam yang lain mengalami pembonsaian habis-habisan oleh pemerintah dalam bentuk pengawasan, pengendalian yang ketat, serta pembatasan terhadap aktivitas dakwahnya. Dalam situasi demikian, umat Islam tidak mampu berkembang dan gagal untuk melakukan mobilitas sosial secara vertikal.

Akan tetapi, ketika pendekatan oposisional-simbolistik kalangan Islam digantikan dengan pendekatan yang lebih akomodatif-sub-stansialistik, tak ada alasan lagi bagi pemerintah untuk meminggirkan kalangan Islam. Pendekatan baru yang lebih akomodatif terhadap Pancasila yang berlangsung sejak akhir dekade 1980-an telah mengantarkan berbagai unsur Islam memperoleh peluang yang semakin luas dalam ruang-ruang negara.

Pergeseran posisi Islam yang semakin ke tengah dalam panggung politik ini sering disebut “politik akomodasi Islam”. Setidaknya ada⁹⁷ empat pola akomodasi yang menonjol: *Pertama*, “akomodasi struktural”, dengan direkrutnya para pemikir dan aktivis Islam untuk menduduki posisi-posisi penting dalam birokrasi negara maupun badan-badan legislatif. *Kedua*, “akomodasi infrastruktur”, yakni penyediaan dan bantuan infrastruktur bagi kepentingan umat Islam dalam menjalankan kewajiban agama mereka, seperti pembangunan masjid-masjid yang disponsori oleh negara. *Ketiga*,

⁹⁷ Secara sistemik, pemerintah menerapkan “dealiranisasi dan deideologisasi” yang terbukti sukses merontokkan gerakan politik Islam. Selain itu, pemerintah juga menerapkan politik “korporatisme” dengan memfusikan partai-partai Islam ke PPP. dengan tujuan agar mudah dikontrol. Lihat M. Imdadun Rahmat, dkk., ‘Ménantang Wacana Resmi: Pergolakan! Umat Islam di Bawah’, jurnal Tashwirul Afkar, edisi no.2, (Mei~Juni 1998), hlm. 6-9. Sebagai upaya pemerintah membendung kekuatan politik Islam, Orde Baru menempuh berbagai cara, antara lain: mengurangi legitimasi politik Islam dengan mengakali sensus penduduk dengan berbagai cara agar jumlah umat Islam berkurang. Cara lain adalah mendorong pertumbuhan agama-agama non-Islam dan berbagai aliran kepercayaan. Hasilnya, selama 20 tahun ketegangan itu, jumlah penganut Kristen meningkat dua kali lipat dan jumlah gereja meningkat lipat. Pada masa itu, sejumlah besar orang Kristen duduk di birokrasi. Bahkan, pemerintah membatasi jumlah jama’ah haji karena kekhawatiran masuknya pengaruh Islam militan yang sedang marak di Timur Tengah melalui jama’ah haji. Lihat Dewi Fortuna Anwar, “Ka’abah dan Garuda: Dilema Islam di Indonesia”, Prisma, no. 4, Tahun XII, (April 1984), hlm. 14.

“akomodasi kultural” berupa diterimanya ekspresi kultural Islam ke dalam wilayah publik, seperti pemakaian jilbab, baju koko, hingga ucapan assalamu’alaikum. *Keempat* “akomodasi legislatif”, yakni upaya memasukkan beberapa aspek hukum Islam menjadi hukum negara, meskipun hanya berlaku bagi umat Islam saja. Pada era baru ini, kesemarakkan kegiatan keislaman terjadi di mana-mana: di masyarakat, dunia pendidikan, dunia bisnis, birokrasi hingga di lingkaran elit politik.

Gerakan Islam akomodatif memiliki prinsip-prinsip gerakan, pendekatan, modus artikulasi pemikiran, dan aksi politik Islam yang berbeda dibanding masa awal Orde Baru. Sebagai akibat sikap represif pemerintah Orde Baru terhadap Islam, sejumlah intelektual dan aktor gerakan Islam mengubah pemikiran dan aksi politiknya, yang tidak lagi legalistik-formalistik dan konfrontatif Perjuangan politik ideologis ini pun mereka tinggalkan. Hal ini dimaksudkan untuk membangkitkan kembali potensi umat dan menumbuhkan simpati pemerintah terhadap Islam dengan memperbaiki hubungan yang tidak harmonis antara Islam dengan negara. Dengan kata lain, generasi baru ini mencari pola relasi agama (Islam) dan negara yang lebih harmonis dan tidak saling curiga. Itulah sebabnya dalam dekade tersebut terjadi pergeseran orientasi di kalangan

organisasi-organisasi kemasyarakatan Islam, kaum intelektual, dan termasuk aktivis partai Islam.

Generasi baru yang disebut “intelektual baru Islam” menempuh strategi kultural dengan memproduksi wacana politik Islam yang inklusif dan substansialistik. Inilah yang menurut Olivier Roy disebut sebagai fenomena Posislamisme yang lebih berciri Islam-nasionalis.

Gerakan Islam substansialis-inklusif ini berhasil membuat hubungan yang harmonis dengan rezim Orde Baru. Hal itu ditandai dengan sejumlah kebijakan politik pemerintah yang mengakomodasi aspirasi umat Islam, seperti kebijakan mengenai Undang-Undang Pendidikan Nasional (1988), Undang-Undang Peradilan Agama (1989), berdirinya ICMI (1990), Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama tentang Efektivitas Pengumpulan Zakat (1991), dan Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah P 86, K tentang diizinkan Pemakaian jilbab bagi pelajar putri.³ Dalam kancah politik Indonesia, akomodasi Islam ini melahirkan fenomena “*ijo royo-royo*” di parlemen maupun birokrasi.

Dengan pendekatan perjuangan yang baru ini, tak bisa disangkal bahwa umat Islam mengalami kemajuan yang sangat besar. Di satu sisi Islam diterima secara tulus dalam kehidupan masyarakat dan di kalangan pemerintahan. Dan, dari sinilah terjadi proses Islamisasi besar-besaran di ranah masyarakat,

dan bahkan di tingkat negara. Di sisi lain, reinterpretasi *nash-nash* tentang kenegaraan yang menghasilkan ijtihad politik (*al-ijtihad as-siyasi*) yang baru tersebut telah mengikis kegundahan teologis umat Islam menyangkut bagaimana menempatkan Islam dalam konteks Indonesia. Dengan fatwa NU bahwa Pancasila dan Islam tak perlu dipertentangkan dan bahwa bentuk dan sistem politik yang dianut pemerintah Indonesia telah memenuhi koridor syari'at Islam, serta penerimaan Muhammadiyah terhadap Pancasila pada masa selanjutnya, telah membuat umat Islam tidak lagi merasa berdosa secara kolektif karena tidak mendirikan negara Islam.

Hubungan mesra umat Islam dengan pemerintah ini pada masa berikutnya telah melahirkan kebangkitan keislaman yang kemudian menjadi pra-kondisi bagi munculnya berbagai kelompok gerakan Islam yang baru, termasuk PKS. Momentum penting datang ketika Orde Baru jatuh dari kekuasaannya. Dalam atmosfir kebebasan, bermunculanlah aktor gerakan Islam baru. Akan tetapi, gerakan mereka berada di luar kerangka *mainstream* proses politik maupun wacana⁹⁸ dalam gerakan Islam dominan. Fenomena munculnya aktor baru ini sering disebut sebagai “gerakan Islam baru” (*new Islamic movement*). Organisasi-organisasi Tarbiyah/PKS, Hizbut Tahrir Indonesia, Majelis Mujahidin Indonesia, Front

⁹⁸ Nurcholish Madjid, *Cita-cita Politik Islam Era Reformasi*, (Jakarta: Paramadina, 1999), hlm. 12.

Pembela Islam, dan Lasykar Jihad merupakan representasi generasi baru gerakan Islam di Indonesia ini.

Bersama bergulirnya reformasi, kelompok-kelompok revivalis Islam ini menemukan momentumnya untuk melakukan akselerasi politik secara kultural (ormas Islam) dan struktural (partai Islam). Dua gerakan ini memiliki peluang yang luas ketika rezim yang berkuasa memberikan angin segar kebebasan setelah lama dipinggirkan secara politik oleh rezim Orde Baru.

Akan tetapi, yang menimbulkan kecemasan, di masa transisi ini, “gerakan Islam baru” mengembalikan model gerakan politik lama dengan ciri yang tidak akomodatif; militan, dan konfrontatif. Ia kembali menampakkan diri sebagai kekuatan daya tekan (oposisi) kepada rezim yang menurut mereka tidak aspiratif terhadap Islam. Pengaruh watak gerakan dari Timur Tengah yang puritanis, fundamentalistik, serta eksklusif mendorong pendukung gerakan ini tak mudah menerima kenyataan sistem politik yang sekular ini.

Kemunculan “gerakan Islam baru” pascakeruntuhan rezim Orde Baru ini menandai kemunculan kembali corak gerakan Islam lama yang oleh Mochtar Mas’oed disebut “Islamisasi negara”, yakni perjuangan politik demi berlakunya syari’at Islam secara formal dalam sebuah negara Islam dengan Cara-Cara konstitusional melalui partai Islam maupun Cara inkonstitusional, seperti perebutan kekuasaan dengan

mobilisasi massa atau dengan jalan pemberontakan bersenjata.⁹⁹ Jargon yang dianut adalah “berangkat dengan agama untuk menyelesaikan masalah bangsa”¹⁰⁰ dengan agenda “Islamisasi negara demi Islamisasi masyarakat”¹⁰¹, Tak pelak, strategi perjuangan yang nyaris hilang pada masa “kemesraan” antara umat Islam dengan Orde Baru ini kembali mengemuka. Cara-Cara Perjuangan politik yang ideologis-oposisional mengalami revitalisasi. Sebagian besar ormas representasi “gerakan Islam baru” .serta partai-partai Islam kembali menghidupkan strategi ini. Bahkan, kalangan jihadis yang bergabung dengan Jama’ah Islamiyah yang memiliki hubungan ideologis kuat dengan MMI telah terperosok dalam jalan terorisme.

Akan tetapi, PKS tidak menjadikan pendirian negara Islam sebagai agenda saat ini. PKS yang merupakan eksponen gerakan revivalisme Islam memilih menempuh strategi lain, yakni “Islamisasi negara” yang non-konvensional. Kelompok ini tetap bercita-cita mewujudkan kehidupan yang Islami, namun tidak serta-merta ingin mendirikan negara Islam dalam pengertian konvensional. PKS menunda agenda' pendirian

⁹⁹ Arief Afandi, (ed.), *Islam: Demokrasi Atas Bawah: Polemik Strategi Perjuangan Umat Model Gus Dur dan Amin Rais*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 76-77

¹⁰⁰ Ibid. hlm. 10.

¹⁰¹ Ibid. hlm. 76.

negara Islam hingga situasi memang memungkinkan. Adapun yang ditempuh oleh PKS adalah memasukkan unsur-unsur dakwah Islam dan nilai-nilai Islam dalam berbagai UU yang ada. Pada taraf yang lebih tinggi, PKS memperjuangkan penerapan syari'at Islam secara formal di mana penerapan syari'at tersebut telah mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat maupun kekuatan-kekuatan politik yang ada. Dalam istilah Mochtar Mas'oed, strategi ini disebut "Islamisasi masyarakat dalam negara nasional".¹⁰²

Pertanyaan yang juga penting untuk diajukan di sini adalah, akankah strategi yang dianut PKS akan menyebabkan bangkitnya ketegangan baru antara umat Islam dengan kekuatan-kekuatan nasionalis yang didukung oleh Militer, Kepolisian, dan parpol-parpol berasas nasionalis? Akankah umat Islam kembali berhadap-hadapan secara frontal dengan pemerintah? Kekhawatiran ini tentu sangat beralasan karena dengan pendekatan oposisional, kekuatan lain bisa melakukan deligitimasi terhadap proses Islarnisasi dan kemajuan besar yang telah dicapai umat Islam.

Jawaban dari pertanyaan ini memang bergantung pada berbagai faktor. Akan tetapi, sebagai pelaku gerakan, PKS merupakan faktor yang sangat penting. Dalam hal ini sya sependapat dengan Imdadun Rahmat, bahwa PKS akan tetap eksis dan menjadi mashlahat bagi rakyat Indonesia pada

¹⁰² Ibid., hlm. 70.

umumnya, dan umat Islam pada khususnya, jika ia mampu merumuskan pola yang tepat dalam meramu unsur-unsur Ikhwanul Muslimin dengan kondisi dan konteks sosial politik serta kultur keagamaan yang ada di Indonesia. Konsep nation state yang berbenturan dengan ideologi Islam menjadi tantangan tersendiri bagi PKS. Agenda memformalkan syari'at Islam sebagai hukum dan aturan publik juga masih menjadi potensi yang bisa berujung ketegangan. Jika PKS menerapkan strategi “nekad” maka tak bisa dielakkan ia akan berhadapan dengan kekuatan politik nasionalis dan bahkan dengan “kekuatan” negara. Bisa jadi PKS akan mengulang sejarah pendahulunya, Masyumi, yang hilang dari jagat politik Indonesia karena dibubarkan.

PKS juga ditantang untuk secara tulus berdialog dengan watak keagamaan umat Islam Indonesia yang memiliki kultur yang khas. Pluralitas dan multikultur yang menjadi sendi kebangsaan juga perlu direspons secara lebih arif. Sebab, sebagaimana dinyatakan sendiri oleh ketua Dewan Syuro PKS, KH. Helmi Aminuddin, “kelompok keagamaan yang berbenturan dengan pluralitas akan hancur”.¹⁰³

Dalam hal ini PKS perlu belajar kepada NU, Muhammadiyah, dan ormas Islam yang secorak dengan keduanya, yang terbukti bisa eksis di negeri ini.

¹⁰³ Ini dinyatakan dalam Rakernas DPP PKS di Bali awal Februari lalu, lihat Kompas

Untuk bisa berdialog secara lebih positif dengan konteks keindonesiaan, PKS dituntut untuk mau menerima cara berpikir kultural-substansialistik. Dengan demikian, PKS harus mengubur dalam-dalam cita-cita mendirikan negara Islam (*iqamah ad-daulah al-Islamiyyah*) yang hingga kini masih “disimpan rapi dalam laci”. PKS juga dituntut untuk mundur selangkah dengan mengubah agenda dakwahnya: tidak dengan formalisasi syari’at Islam sebagai peraturan publik, tetapi cukup memperjuangkan nilai-nilai dan ruh syari’at Islam untuk masuk dan menjiwai undang-undang dan peraturan yang ada. Dengan demikian, Islamisasi pada segala segi kehidupan bisa dijalankan umat Islam dengan lebih mendapatkan penerimaan luas dari masyarakat dan berlangsung tanpa ketegangan, paksaan, dan apalagi kekerasan. Dengan demikian, perwujudan dari perintah agama: *udhulu fis silmi kaffah* (masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh) tak harus berbenturan dengan asas *hubbul wathan minal iman* (cinta tanah air adalah bagian dari iman).

Daftar Pustaka

- Asy'ari, Suaidi, *Nalar Politik NU dan Muhammadiyah*, Yogyakarta :LKiS, 2010.
- Aziz,Thaba,Abdul, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*, Jakarta:Gema Insani Pers, 1996.
- Bubalo, Anthony & Greg Fealy, *Joining the Caravan? Middle East, Islamism, and Indonesia*, Lowy Institute for International Policy, Australia, 2005.
- Denzin, Norman K & Yvonna S. Lincoln (eds.), *Handbook of Qualitative Research*, Sage Publication, 1994.
- Effendy, Bahtiar, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, Paramadina, Jakarta, 1998.
- Effendy, Bahtiar, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, Jakarta: Paramadina, 1998.
- Furkon, Aay Muhammad, *Partai Keadilan Sejahtera: Ideologi dan Praksis Politik Kaum Muda Muslim Indonesia Kontemporer*, Teraju, Jakarta, 2004.
- Hadi, Sutrisno *Metodologi Research*, Jilid 1, Andi Offset, Yogyakarta, 2000.
- Hefner, Robert W., *Civil Islam: Muslim and Democratisation in Indonesia*, Princeton University Press, Princeton & Oxford, 2000.
- Hikam, Muhammad AS, *Demokrasi dan Civil Society*, LP3ES, Jakarta, 1996.
- Hill, Hal (ed.), *Indonesia's New Order: The Dynamics of Socio-Economic Transmormation*, Allen and Unwin, Australia, 1994.
- Hudhaiby, M.Ma'mun, *Politik Islam dalam Pandangan Ikhwanul Muslimin*, Engkos Kosasih (penerj.), PT Syamwil Cipta Media Bandung, 2003.

- Iqbal, Muhammad dan Amien Husein Nasution. *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Machmudi, Yon, *Partai Keadilan Sejahtera: Wajah Baru Islam Politik Indonesia*, Syamil Cipta Media, Bandung, 2006.
- Matta, Anis, *Menikmati Demokrasi: Strategi Dakwah dan Meraih Kemenangan*, Pustaka Saksi, Jakarta, 2002.
- _____, *Integrasi Politik dan Dakwah*, Sekjen Bidang Arsip dan Sejarah, Arah Press, Jakarta, 2008
- McCharty ,& Zald, McAdam “Introduction”, *Comparative Perspective*, 1996.
- Muhtadi, Burhanuddin *Dilema PKS : Suara dan Syari’ah*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2012 .
- Mujani, Saiful, dkk., *Benturan Peradaban: Sikap dan Perilaku Islamis Indonesia terhadap Amerika Serikat*, PPIM, Freedom Institute, Penerbit Nalar, Jakarta, 2005.
- _____, *Muslim Demokrat: Islam, Budaya Demokrasi dan Partisipasi Politik di Indonesia Pasca Orde Baru*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007.
- Munandar, Arief Antara Jemaah Dan Partai Poltiik: *Dinamika Habitus Kader PKS dalam Arena Politik Indonesia Pasca Pemilu 2004*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2011
- Nashir, Haedar, *Gerakan Islam Syari’at: Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia*, PSAP Muhammadiyah, Jakarta, 2007.
- Qardhawi, Yusuf, *Membumikan Syari’at Islam*, Ade Nurdin & Riswan (penerj.), Mizan, Bandung, 2003.

- Said Damanik, Ali *Fenomena Partai Keadilan : Transformasi 20 Tahun Gerakan Tarbiyah di Indonesia*, Jakarta: Teraju, 2002
- Salim, Arskal, *Partai Islam dan Relasi Agama-Negara*, Pusat Penelitian IAIN Jakarta, 1999.
- Suntana, Ija. *Kapita Selekta Politik Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2010.
- Tarrow, Sydney & Charles Tilly, Doug McAdam, *Dynamics of Confention*, Cambridge University Press, New York, 2001.
- Tarrow, Sidney, *The New Transnational Activism*, Cambridge University Press, New York, 2005.
- , *Power in Movement: Social Movements and Contentious Politics*. Cambridge University Press, 1994.